

**SKRIPSI**

**JEJARING AKTOR INOVASI DALAM PELAKSANAAN BADAN USAHA**

**LORONG (BULO) DIKELURAHAN BUKANA KECAMATAN**

**RAPPOCINI KOTA MAKASSAR**

**IDHA AYU KUSUMAWARDHANI**

**105640181913**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

## PERSETUJUAN


Judul Proposal : Jejaring Aktor Inovasi dalam pelaksanaan Badan Usaha  
Lorong (BuLo) di Kelurahan Buakana Kecamatan  
Rappocini kota Makassar.  
Nama Mahasiswa : Idha Ayu Kusumawardhani  
Nomor Stambuk : 105640 1819 13  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

  
Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

Pembimbing II

  
Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si

Mengetahui:

Dekan Fisipol  
Universitas Muhammadiyah  
Makassar



Dr. Hj. Wiyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan  
Fisipol Unismuh Makassar

  
Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

## PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor. 1645/FSP/A.1-VIII/X/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada rabu 10 Oktober 2018.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

### Penguji:

1. Abdul Kadir Adys ,SH MM (Ketua)
2. Hj.Andi Nuraeni Aksa ,SH,MH
3. Drs.H. Ansyari Mone, MPd
4. Rudi Hardi,S.Sos, M.Si

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Idha ayu kusumwardhani

Nomor Stambuk : 105640 1819 13

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, , Oktober 2018

## ABSTRAK

**Idha ayu kusumawardhani, 2018. Jejaring Aktor Inovasi dalam pelaksanaan Program Badan Usaha Lorong (BuLo) di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar, (dibimbing oleh H.Ansyari Mone dan Muchlas M Tahir)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Jejaring Aktor Inovasi dalam pelaksanaan Badan Usaha Lorong (BuLo) dan untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Badan Usaha Lorong (BuLo) di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, penelitian yang dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis seluruh data yang ada. Baik itu data hasil wawancara, catatan lapangan dan data-data lain yang sifatnya menunjang penelitian. Data dikumpulkan dari hasil wawancara, kemudian dianalisa berdasarkan Tahapan Jejaring Aktor Inovasi yang melibatkan tahap *Problematization, Interesement, Enrollment, Mobilization* dan kendala yang dihadapi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan tahapan Jejaring Aktor Inovasi telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat pada tahap *problematization* menunjukkan ada gagasan yang kuat dari aktor kunci dari program Bulo ini yaitu walikota makassar yang mengagas inovasi program BULO dengan melakukan pemanfaatan lorong. Pada tahap *interesement* menunjukkan program ini inovatif dan menarik karena ada upaya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dengan mengoptimalkan lorong selain itu pendekatan kebersamaan atau kegotonroyongan merupakan hal yang positif untuk program ini. Pada tahap *Enrollment* menunjukkan program BULO terfokus pada kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Komponen atau aktor yang juga memiliki peran dalam pelaksanaan program ini adalah RT dan RW yang merupakan motor penggerak pembentukan Koptanrong melalui fungsi RT dan RW yang dapat mengidentifikasi warga sekitar yang dapat berperan aktif. Pada tahap *Mobilization* menunjukkan bahwa mobilisasi yang dilakukan oleh aktor tingkat kelurahan merupakan upaya yang sangat penting dalam program BULO karena telah ada kekuatan kelompok masyarakat namun untuk kesinambungan program BULO kemampuan aktor pada level SKPD menjadi penentu keberhasilan pembinaan program BULO. Sementara kendala yang dihadapi jejaring aktor inovasi dalam pelaksanaan BULO yaitu tidak semua lorong dapat dijadikan objek pelaksanaan program, tidak dioptimalkannya pemanfaatan sarana, partisipasi pemuda masih minim lebih banyak didominasi ibu rumah tangga, dan kendala pemasaran hasil panen.

Kata Kunci : Jejaring Aktor, Inovasi, Program, BULO.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul” **Jejaring Aktor Inovasi Dalam Pelaksanaan Badan Usaha Lorong (BULO) Di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar**”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu **Drs. H.Ansyari Mone, M.Pd** selaku Pembimbing I dan bapak **Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Selain itu penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim , SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam urusan administrasi dikampus.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan dorongan dan motivasi dalam kelancaran penulisan skripsi.
6. Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar dan seluruh jajarannya meluangkan waktunya memberikan informasi dan data selama penelitian.
7. Lurah Kelurahan Buakana beserta jajarannya yang telah memberikan data informasi selama penulis melaksanakan penelitian
8. Teruntuk yang paling kusayangi dan cintai kedua orang tua saya yakni bapak Jayadi Junaidi dan Ibu Rustini Rasjid yang telah merawat, membimbing, mendidik dan membiayai anaknya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan yang selalu menjadi motivasi penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk saudara dan saudari saya yaitu icha,ian dan iis yang telah memberikan semangat dan doa yang tulus kepada penulis.
10. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, terkhusus untuk kelas Nonreg Ilmu Pemerintahan



angkatan 2013 yang telah memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat di selesaikan oleh penulis.

11. Buat saudara seperjuangan saya yang tersayang yakni mila karmila, amaliah rachmat dan yulianti j yang setiap saat menemani saya dikampus dan yang telah memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
12. Buat semua teman-teman dan sahabat-sahabat yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi.

.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan, dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang melimpah atas segala kebaikan kita semua, Amin.

Makassar, 26 september 2018

Idha Ayu Kusumawardhani

## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Penerimaan Tim .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Ilmiah .....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar .....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengertian Jejaring Aktor.....	8
B. Konsep Pengertian Inovasi .....	16
C. Pemerintah Daerah .....	28
D. Konsep Landasan Hukum Badan Usaha Lorong.....	32
E. Kerangka pikir .....	37
F. Fokus Penelitian .....	37
G. Deskripsi Fokus Penelitian .....	38

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	41
B. Jenis Dan Tipe Penelitian .....	41
C. Sumber Data .....	42
D. Informan Penelitian .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
F. Teknik Analisis Data .....	46
G. Keabsahan Data .....	47

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	49
B. Jejaring Aktor Inovasi Dalam Pelaksanaan Badan Usaha Lorong Di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini .....	69
a. <i>Problematization</i> .....	70

b. <i>Interessement</i> .....	72
c. <i>Enrollment</i> .....	75
d. <i>Mobilization</i> .....	77
C. Kendala Jejaring Aktor Inovasi Dalam Pelaksanaan Badan Usaha Lorong Di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini .....	82

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran .....	88

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	90
-----------------------------	----

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Informan.....	42
----------------------------	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Tingkatan-Tingkatan Inovasi.....	22
Gambar 2 Bagan Kerangka Pikir.....	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kota Makassar adalah salah satu kota di Indonesia. Padat penduduk, pusat kegiatan pemerintahan, industri, pendidikan, dan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan. Perkembangan kota yang sangat pesat disebabkan oleh dinamika penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan urbanisasi. Pertumbuhan penduduk kota yang tidak terkendali menyebabkan munculnya aktivitas pembukaan lahan untuk pemukiman. Kebutuhan ruang meningkat untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan penduduk kota. Meningkatnya jumlah permintaan akan ruang kota, mengakibatkan kemerosotan kualitas lingkungan.

Meningkatnya permintaan akan lahan aktivitas perkotaan, memunculkan sejumlah permasalahan terkait alih fungsi lahan dan perubahan intensitas pemanfaatan lahan. Salah satu dampaknya adalah berkurangnya ruang terbuka hijau, baik dalam proporsi privat maupun publik. *Urban sprawl* yang mengarah pada pinggiran kota telah merubah fungsi lahan-lahan pertanian menjadi lahan perumahan. Perubahan ini tentunya berdampak pada ketergantungan Kota Makassar akan suplai produk-produk pertanian. Selain itu, dampak terhadap pertumbuhan penduduk, baik dari sisi pertumbuhan alami maupun migrasi akibat tingginya daya tarik Kota Makassar, berkontribusi pada tingginya tingkat kepadatan penduduk dan bangunan pada wilayah-wilayah pusat kota. Akses jalan yang semakin sempit akibat bergesernya pemanfaatan ruang terbuka pada halaman-halaman privat menjadi bangunan-bangunan yang massif. Akses jalan

yang sempit mengubah menjadi lorong-lorong yang tidak terawat dan cenderung mengalami penurunan kualitas visual dan lingkungan. Kawasan-kawasan kepadatan tinggi berubah menjadi kampung-kampung kumuh yang tidak terawat, dan berdampak pada kualitas sosial budaya warga yang semakin menunjukkan nilai degradasi sosial budaya yang negatif. Sebagian besar warga Kota Makassar, hidup dan bermukim pada kawasan-kawasan tersebut, yang mana jika tidak dilakukan penanganan maka produktivitas warga kota akan semakin menurun. Korelasi antara rendahnya kesehatan lingkungan terhadap berkurangnya produktivitas warga merupakan sebuah fenomena-fenomena yang telah hadir pada kawasan perkotaan di Kota Makassar. (Dinas Ketahanan Pangan, 2017).

Dasar hukum pada program Badan Usaha Lorong (BuLo) Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Izin Pemanfaatan, Penataan, Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar, dimana dengan adanya pemanfaatan ruang pada lorong Kota Makassar maka dapat pula memberikan kontribusi pada ruang terbuka hijau. Badan Usaha Lorong (BuLo) adalah suatu program pemerintah Kota Makassar yang bertujuan mengoptimalkan lorong-lorong yang ada di Kota Makassar yang dikoordinasikan dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.

Menggunakan pendekatan jaringan dalam pelaksanaan kebijakan berarti bahwa, beberapa aktor bekerjasama untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan, ini jauh lebih efektif, dari pada organisasi secara mandiri. Selain itu, berbagai kepentingan aktor-aktor kebijakan akan mudah terakomodir dalam pelaksanaan kebijakan (Huda, 2016).

Untuk menganalisa realitas, teori jejaring aktor (TJA) menggunakan konsep translasi sehingga menjadi jelas mengapa suatu realitas sosial/teknikal itu akhirnya menjadi stabil/tak stabil dalam jangka waktu tertentu. Translasi dapat dipahami sebagai suatu proses di mana suatu aktor memobilisasi sumber daya atau suatu jejaring-aktor lain untuk membentuk suatu aliansi yang menghasilkan suatu jejaring aktor yang stabil. Penilaian terhadap pola jaringan aktor yang stabil dalam melaksanakan inovasi dapat diukur dengan menggunakan empat elemen dasar yaitu: *Problematization* (Perumusan Masalah), *Interessement* (Pembagian Peran), *Enrolment* (Keterlibatan Aktor), *Mobilization* (Proses Mobilisasi) (Priyatma, 2013).

Pada tahun 2017, Walikota Makassar membentuk Badan Usaha Lorong (BULO) yang dapat menampung aktivitas-aktivitas produktif warga lorong, kemudian pada setiap lorong dibentuk Kelompok Tani Lorong (Poktanrong) dengan 20 anggota tiap kelompok dan selanjutnya diberikan bibit cabe untuk di tanam di pekarangan rumah mereka. Program pembentukan Badan Usaha Lorong ini merupakan kelanjutan dari program Lorong *Garden*, dan pada tahap awal dari sisi kelembagaan dibentuk kelompok yang beranggotakan 20 orang di setiap lorong untuk selanjutnya diverifikasi dan dinyatakan layak atau tidak untuk ikut program BULO. Program Badan Usaha Lorong (BuLo) dapat direplikasi dengan mudah di seluruh kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik yang sama dengan pertumbuhan Kota Makassar. Modifikasi yang adaptif terhadap karakteristik kawasan menjadikan program ini dapat mempercepat proses



perbaikan dan penanganan kawasan-kawasan kepadatan tinggi di perkotaan (Makassar Online,2015).

Pemasalahan yang muncul terkait dengan Badan Usaha Lorong Kota Makassar yaitu bagaimana strategi pemasaran yang ideal dari hasil-hasil atau produksi dari BuLo ini, terkait hal tersebut belum terlaksana dengan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan (Sindo News.com, 2017), bukan hanya itu saja berdasarkan pengamatan peneliti masih terbatasnya bibit yang disediakan ditambah dengan keterbatasan lahan untuk dijadikan sebagai tempat pelaksanaan program BuLo yang dipengaruhi dengan kondisi kota Makassar yang semakin padat belum lagi berbicara mengenai lingkungan sosial masyarakat yang masih kurang memahami akan pentingnya tujuan mulia dari pelaksanaan BuLo ini.

Visi “Makassar Kota Dunia Yang Nyaman Untuk Semua” dituangkan salah satunya melalui konsep inovasi Badan Usaha Lorong (*BuLo*) mampu mewujudkan Makassar yang bernuansa kota dunia dengan beragam inovasi yang dimilikinya. Ada beberapa inovasi yang telah di belum terlaksana dengan baik yaitu pada inovasi *Smart Card*, dan lorong garden, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman satuan perangkat daerah di Kota Makassar terhadap inovasi-inovasi yang dicanangkan tersebut, sehingga membuat masyarakat (*Stakeholder*) menjadi kurang paham mengenai hal tersebut. Untuk mewujudkan Badan Usaha Lorong (*BuLo*) khususnya untuk meningkatkan sistem perekonomian masyarakat Kota Makassar (Makassar Online, 2015).

Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan inovasi di kota Makassar, dimana Yani (2017) terkait dengan kontribusi modal

sosial dalam pengembangan komunitas pertanian perkotaan (*urban farming*) di lorong garden kelurahan kassi-kassi kecamatan rappocini kota Makassar dimana menunjukkan kontribusi modal sosial yang tidak berbeda jauh secara signifikan. Selain itu, ditemukan juga tipologi modal sosial masyarakat lorong garden mengarah kepada menjembatani (*bridging*) atau inklusif (*inclusive*). Namun, keterikatan internal yang terjalin mewarnai struktur kolektif dan kohesifitas masyarakat lorong garden tetap stabil dan cenderung menguat seiring penguatan pada ikatan rukun tetangga yang memang sudah di pupuk sejak lama. Sedangkan Sartika (2017) terkait dengan Analisis Pengelolaan Lorong Garden (Longgar) di kota Makassar dimana menunjukkan pelaksanaan program pengelolaan lorong garden sebagai kelanjutan dari program Gerakan Makassar Ta“ Tidak Rantasa.

Alasan penulis melakukan penelitian ini karena penelitian tentang usaha lorong masih minim dilakukan kemudian konsep jejaring aktor pada program Badan Usaha Lorong (BuLo) masih jarang dilakukan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi pemerintah kota makassar dalam upaya mengoptimalkan fungsi lorong di Kota Makassar.

Berdasarkan latar belakang diatas serta melihat masalah-masalah yang ada dalam latar belakang penelitian ini, maka peneliti mengambil judul “**Jejaring Aktor Inovasi dalam pelaksanaan Program Badan Usaha Lorong (BuLo) di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan diatas, maka peneliti ini berusaha seoptimal mungkin untuk mengkaji masalah dengan batasan:

1. Bagaimana Jejaring Aktor Inovasi dalam pelaksanaan Badan Usaha Lorong (*BuLo*) di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini ?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Badan Usaha Lorong (*BuLo*) di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti, maka peneliti yang dilaksanakan berdasarkan atas bidang ilmu pemerintahan, dan terkhusus membahas masalah “Jejaring Aktor Inovasi dalam pelaksanaan Badan Usaha Lorong (*BuLo*) di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jejaring Aktor Inovasi dalam pelaksanaan Badan Usaha Lorong (*BuLo*) di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Badan Usaha Lorong (*BuLo*) di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pengembangan teori khususnya inovasi pemerintah daerah.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang berminat mengadakan penelitian pada bidang yang sama dalam rangka pengembangan inovasi pemerintah daerah dalam segala bidang.

3. Kegunaan praktis. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi pemerintah kota makassar dalam upaya menciptakan serta melaksanakan inovasi pemerintah daerah khususnya terkait dengan pelaksanaan Badan Usaha Lorong (*BuLo*) dan inovasi dalam segala bidang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Pengertian Jejaring Aktor**

Menurut Priyatma (2013: 109) jejaring aktor dikembangkan para ilmuwan yang bergerak mempelajari pengembangan sains dan teknologi. Konsep 'jejaring-aktor' pertama digagas oleh Michel Callon, Bruno Latour, dan John Law di tahun 1980an. Menggunakan metafora jejaring aktor, asumsi ontologi yang dipakai oleh teori jejaring aktor (TJA) adalah bahwa realitas (sosial, organisasi, teknologi, dll) semuanya hanyalah hasil atau akibat dari suatu relasi antara berbagai jenis entitas baik yang berupa bendawi maupun manusiawi. Semua entitas yang terlibat di dalam jejaring ini selanjutnya disebut dengan "aktor". Jejaring ini hanya ada dalam benak peneliti dan sesuai dengan kepentingannya yang tentu saja berakibat pada masuk tidaknya aktor tertentu.

Menurut Priyatma (2013:112) memakai konsep jejaring ini, teori jejaring aktor (TJA) memberi gambaran yang berbeda dalam memahami suatu realitas. Kalau pada umumnya realitas digambarkan sebagai sebuah luasan datar, teori jejaring aktor (TJA) memakai metafora serabut. Jadi realitas tidak lagi digambarkan sebagai luasan dua dimensi atau struktur 3 dimensi tetapi merupakan sebuah graph yang dapat memiliki banyak dimensi. Teori jejaring aktor (TJA) membuat klaim bahwa realitas tidak mungkin dapat secara lengkap dipahami tanpa membayangkannya sebagai jejaring yang saling kait-mengkait dengan struktur yang tidak mungkin berbentuk sistemik serta berada dalam susunan yang hierarkhis. Beberapa hal pokok dari teori jejaring aktor (TJA)

perlu disebutkan di sini untuk memberikan dasar yang cukup bagi dipakainya teori jejaring aktor (TJA) ini sebagai kerangka untuk memahami inovasi teknologi. (Priyatma : 2013:110-111)

- a) Teori jejaring aktor (TJA) memandang realitas sosial dan teknikal sebagai jejaring kompleks relasi yang melibatkan entitas manusiawi (*human*) dan non-manusiawi (*non-human*)
- b) Teori jejaring aktor (TJA) memakai asumsi radikal bahwa baik entitas manusiawi maupun non-manusiawi tidak mempunyai keistimewaan satu terhadap yang lain dalam menentukan stabilitas suatu realitas sosial.
- c) TJA menolak pandangan esensialisme dan sebagai gantinya menganut pandangan relasionalisme yang meyakini bahwa entitas manusiawi dan non-manusiawi keduanya hanyalah merupakan akibat atau hasil dari suatu jejaring dan bukan sesuatu yang ada karena dirinya sendiri.
- d) Teori jejaring aktor (TJA) merujuk semua entitas yang terlibat dalam jejaring heterogen dan kompleks ini sebagai aktor atau jejaring-aktor.
- e) Teori jejaring aktor (TJA) memperlakukan jejaring aktor yang stabil sebagai 'kotak-hitam' sehingga analisis terhadapnya dapat dilakukan hanya melalui input dan outputnya saja. Kotak hitam ini dapat saja dibuka dan dianalisa sebagai jejaring aktor dengan cara menelusuri semua aktor dan relasi yang terlibat di dalamnya

Untuk membuka suatu kotak hitam realitas, Teori jejaring aktor (TJA) menggunakan konsep translasi sehingga menjadi jelas mengapa suatu realitas sosial/teknikal itu akhirnya menjadi stabil/tak stabil dalam jangka waktu tertentu.

Translasi dapat dipahami sebagai suatu proses di mana suatu aktor memobilisasi sumber daya atau suatu jejaring-aktor lain untuk membentuk suatu aliansi yang menghasilkan suatu jejaring aktor yang stabil. Proses translasi dalam mengukur Jejaring Aktor Inovasi akan melibatkan 4 tahap yang masing-masing sebagai berikut:

- a) *Problematization*. Di tahap ini satu atau lebih aktor kunci merumuskan masalahnya serta mendefinisikan peran aktor lain dalam penyelesaian masalah yang ia usulkan. Penyelesaian diusulkan sedemikian hingga semua aktor yang terlibat terikat kepada suatu mekanisme kendali terpusat yang disebut dengan “*obligatory passage point (OPP)*.”
- b) *Interessement*. Di tahap ini semua aktor yang teridentifikasi di tahap pertama diberikan peran khusus dan identitas khusus sedemikian hingga mereka akan tertarik terhadap suatu program/kegiatan yang ditawarkan. Program atau kegiatan ini disebut dengan program *interest* karena tujuannya memang untuk menarik mereka untuk terlibat dalam jejaring.
- c) *Enrollment*. Keberhasilan suatu program/kegiatan untuk menarik para aktor untuk terlibat dalam suatu penyelesaian masalah ini akan menghasilkan komitmen para aktor menjadi bagian dari jejaring aliansi tersebut. Jika banyak aktor akhirnya menggabungkan diri ke dalam jejaring ini maka dikatakan bahwa proses enrolment telah berhasil
- d) *Mobilization*. Kemampuan untuk mengerakkan sumberdaya, dan mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan program

sehingga yang dilakukan dapat menjadi katalisator sehingga seluruh jaringan aktor berfungsi dengan baik.

Jaringan adalah konsep untuk menunjuk relasionalitas dari struktur, dan entitas adalah aktor yang hanya berhubungan dengan entitas lain. Seorang aktor merupakan unsur utama dalam memberikan efek dari hubungan ini. Dengan demikian, tanda ini dilihat sebagai relasi, yang mengindikasikan bahwa baik aktor maupun jaringan sangat penting untuk membentuk konsep jaringan aktor. Jaringan Aktor 'secara simultan adalah aktor yang aktivitasnya menjadi elemen networking heterogen dan jaringan yang mampu mendefinisikan dan mengubah apa yang dibuatnya. Ini adalah 'cara mengungkapkan dan mengeksplorasi relasionalitas radikal. ANT (Actor-Network Theory) adalah sebuah pendekatan yang tidak didasarkan pada kategori sosial yang sudah ada sebelumnya seperti kelas dan jenis kelamin.

Argumen utama ANT adalah bahwa semua entitas pada awalnya sama dan tidak pasti. Ini tidak berarti bahwa perbedaan tidak ada, tapi jika ada disebabkan mereka diciptakan dalam hubungan dengan entitas lain, bukan karena mereka memiliki urutan. Asumsi ini berdampak pada bagaimana analisis ANT melakukan penelitian dan fokus penelitian mereka. Tugas analisis adalah untuk mengeksplorasi entitas yang diciptakan oleh hubungan tersebut, karena ANT berkaitan dengan bagaimana mengeksplorasi hubungan relasionalitas.

Metodologi utama ANT adalah 'mengikuti para aktor'. ANT menggunakan 'beberapa sifat jaring yang paling sederhana dan kemudian menambahkannya sebagai aktor yang melakukan beberapa pekerjaan.



Menekankan bahwa fokus penelitian harus menekankan pada pekerjaan, pergerakan, arus, dan perubahan dari pada aktor dan jaringan sebagai unsur utama . Oleh karena itu, disarankan agar istilah 'worknet' atau hubungan kerja lebih tepat daripada jaringan, karena memungkinkan seseorang melihat proses yang terjadi dalam meletakkan jaringan: yang pertama sebagai mediator aktif, yang kedua sebagai seperangkat perantara yang stabil.

ANT atau teori jaringan aktor merupakan sebuah pendekatan dalam teori sosial dan penelitian yang memperlakukan benda sebagai bagian dari jaringan sosial. Kapasitas non manusia ikut menentukan sistem dan atau jaringan. ANT dikembangkan pertama kali tahun 1980 di Perancis oleh Michel Callon, Bruno Latour, dan John Law, dapat lebih teknis digambarkan sebagai metode "material-semiotik". Artinya ada peta materi dan semiotik (konsep) dalam hubungan yang simultan. Pendekatan ini tidak berusaha untuk menjawab benar atau salah untuk sebuah peristiwa, melainkan berusaha memberikan penjelasan untuk memahami kombinasi dan interaksi di antara unsur-unsur yang ada. Oleh karenanya ANT termasuk pendekatan konstruktivis. ANT telah meluas penggunaannya bukan hanya di bidang sains dan teknologi saja tetapi sudah merambah ke organisasi, informatika, studi kesehatan, geografi, sosiologi, antropologi, gender dan ekonomi. ANT ini sengaja digunakan dalam penelitian ini. Ada beberapa hal penting dalam ANT ini sebagaimana dikemukakan Bruno Latour (dalam Susanti dkk, 2014: 10-11) yaitu:

1. Sebuah *Metode Material-Semiotik* Walaupun disebut teori, ANT tidak menjelaskan mengapa dan bagaimana jaringan berbentuk; sebaliknya

ANT adalah cara yang sebenarnya untuk mengeksplorasi hubungan relasional dalam jaringan sehingga dalam hal ini ANT juga berperan sebagai sebuah metode. Sebaliknya, ANT merupakan sebuah cara untuk benar-benar mengeksplorasi hubungan relasional dalam jaringan. Lebih lanjut Latour mengemukakan bahwa penjelasan tersebut tidak harus berbentuk deskripsi, walaupun deskripsi dapat digunakan. Oleh karena itu seringkali bukan saja disebut teori, tetapi juga metode dan acuan. Pendekatan ANT ini sering dikaitkan dengan versi lain material-semiotik. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk membangun kepercayaan terhadap ethnomethodology yang mendeskripsikan secara rinci bagaimana aktivitas bersama, kebiasaan dan prosedur dipertahankan. Ada kesamaan antara ANT dan pendekatan interaksi simbolik sebagai bentuk baru dari *Grounded Theory* seperti analisis situasional yang keberadaannya sebagai sebuah perbandingan.

2. Jaringan Aktor Konsep yang paling utama dalam ANT adalah jaringan aktor. Konotasi jaringan aktor adalah: a) Menunjukkan bahwa apa yang digambarkan mengambil bentuk jaringan, yang kenyataannya belum tentu demikian. b) Tidak memiliki apriori dalam bentuk hubungan, tidak terikat dengan mitos yang ada baik dari kalangan atas (elit) ataupun bawah (masyarakat), serta tidak terikat asumsi makro/mikro yang berkembang.

Teori jaringan aktor mencoba untuk menjelaskan bagaimana asal jaringan material-semiotik bersama-sama untuk bertindak sebagai

keseluruhan kelompok aktor yang terlibat dalam menciptakan makna (baik material dan semiotik). ANT secara eksplisit berusaha menghubungkan unsur-unsur yang berbeda bersama-sama menuju jaringan, sehingga membentuk satu kesatuan yang tampaknya koheren. Jaringan ini bisa bersifat sementara atau tetap, tergantung intensitas hubungan yang dilakukan atausebaliknya, justru jaringan yang akan larut. Bruno, Latour, dan Law juga menganggap bahwa dalam jaringan hubungan secara instrinsik dapat tidak koheren, sehingga dimungkinkan terjadi konflik. Proses hubungan sosial ini harus dilakukan terus menerus. Konsep lainnya yang juga penting adalah adanya *aktan*. *Aktan* menunjuk pada tindakan atau pelaku baik itu manusia, non-manusia, atau pun jaringan yang memainkan peranan aktif sebagai bentuk yang menggambarkan hubungan satu sama lain.

Hal ini mengasumsikan bahwa tidak ada segala sesuatu yang berada di luar jaringan hubungan, sehingga diasumsikan tidak ada perbedaan dalam kemampuan teknologi, manusia, hewan, atau di luar non-manusia untuk melakukan tindakan(atau gabungan unsur tersebut). Dengan demikian seorang aktor yang terlibat dalam jaringan-aktor juga terjebak dalam jaringan hubungan, dan menjadi bagian dari hubungan itu. Kesimpulan logisnya, setiap aktor menjadi bagian kecil bagi sekumpulan aktor. Sebagai contoh, sistem kompleks yang ada pada sebuah mobil yang terdiri dari sejumlah komponen elektronik dan mekanik yang pada dasarnya tersembunyi dari pandangan pengemudi. Pengemudi hanya

berurusan dengan mobil sebagai objek tunggal. Efek ini dikenal sebagai *punctualisation* (ketepatan waktu), dan ini mirip dengan ide abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Ketika jaringan aktor rusak, efek *punctualisation* cenderung berhenti juga. Dalam bukunya Pandora Hope, Latour menyamakan *depunctualization* (ketidaktepatan waktu) sebagai sebuah *black box*. Ketika ditutup, kotak terlihat sederhana namun ketika dibuka terlihat semua elemen di dalamnya

3. Aktor Manusia dan Non-Manusia Konsep aktor manusia dan non-manusia juga memegang peran penting dan perlakuan yang sama dalam ANT. ANT mengasumsikan bahwa semua entitas dalam jaringan dapat dan harus dijelaskan dengan istilah-istilah yang sama atau disebut prinsip *generalized symmetry* (simetri umum). Mengapa? Sebab perbedaan di antara mereka dihasilkan dalam jaringan hubungan, sehingga tidak diperbolehkan ada pengecualian. Dalam konsep aktor manusia dan non-manusia, ada perbedaan antara Perantara (*Intermediaries*) dan Mediator. Perantara adalah entitas yang tidak membuat perbedaan.

Aktor yang berjejaring secara umum dikelompokkan kedalam ruang-ruang “negara”, “masyarakat sipil” dan “swasta”. Hubungan para aktor dapat berwujud: kerjasama bahkan dapat menimbulkan konflik; sehingga untuk memelihara relasi tersebut, diperlukan skema resolusi konflik atau penyeimbangan kekuasaan antar aktor. Hubungan masing-masing aktor dalam ranah pengelolaan sumber daya alam, juga ditentukan oleh ideologi politik/kekuasaan dan orientasi ekonomi yang

dianut aktor. Lazimnya, negara merupakan regulator dan menjalankan kekuasaannya berbasiskan ide sentralisme, bahkan diejawantahkan melalui sistem dekonsentrasi hingga desentralisasi. Di sisi lain, masyarakat sipil yang diklaim banyak pihak telah eksis sebelum suatu negara eksis, memiliki otoritas dan kekuatan pengaruh yang bersifat teritorial dalam ruangan kepemilikan sumber daya lokal. Warga sipil mengorganisasikan dirinya melalui lembaga-lembaga informal atau lembaga adat, yang semakin hari diperhadapkan dengan tantangan akulturasi pengaruh eksternal. Berjalan bersama-sama dengan 'negara', 'swasta' kemudian dipandang sebagai mitra utama yang akan mampu membantu mengelola sumber daya negara termasuk sumber daya alam untuk kelangsungan negara. Pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh 'swasta' telah memberikan dampak signifikan bagi upaya pemenuhan pundi keuangan Negara untuk melaksanakan pembangunan. Namun di sisi lain, terjadi eksesi yang berdampak pada 'termarginalkannya' masyarakat sipil atau masyarakat adat di wilayahnya (Innah, 2012: 98).

## **B. Konsep Pengertian Inovasi**

### **1. Pengertian Inovasi.**

Kreatif dan inovatif adalah suatu kemampuan untuk memindahkan sumber daya yang kurang produktif menjadi sumber daya yang produktif sehingga memberikan nilai ekonomis. baik langsung maupun tidak langsung seorang wirausahawan adalah orang yang mampu membawa perubahan pada lingkungannya. disisi lain ia juga orang yang sanggup menerima perubahan yang terjadi dan menyikapi perubahan tersebut dengan positif. ia juga berani

mengambil resiko berhasil ataupun gagal di setiap jalan yang ia ambil. wirausahawan mampu bertahan pada kondisi perekonomian yang sulit dan serba kalut. karena disaat semua resah, ia memiliki kreasi dan inovasi untuk memindahkan sumber daya yang kurang produktif menjadi sumber daya yang produktif sehingga memberikan nilai ekonomis. Berdasarkan pengertian tersebut, Robbins lebih memfokuskan pada tiga hal utama yaitu :

1. Gagasan baru yaitu suatu olah pikir dalam mengamati suatu fenomena yang sedang terjadi, termasuk dalam bidang pendidikan, gagasan baru ini dapat berupa penemuan dari suatu gagasan pemikiran, ide, sistem sampai pada kemungkinan gagasan yang mengkristal.
2. Produk dan jasa yaitu hasil langkah lanjutan dari adanya gagasan baru yang ditindak lanjuti dengan berbagai aktivitas, kajian, penelitian dan percobaan sehingga melahirkan konsep yang lebih konkret dalam bentuk produk dan jasa yang siap dikembangkan dan diimplementasikan termasuk hasil inovasi dibidang pendidikan.
3. Upaya perbaikan yaitu usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan yang terus menerus sehingga buah inovasi itu dapat dirasakan manfaatnya.

David Albury mendefinisikan inovasi adalah berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Sifat baru inovasi tidak berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatannya dan kehadirannya (Djamrut, 2015:5-6).

Inovasi menjadi terminologi yang populer dekade ini menyusul meningkatnya desakan publik terhadap perubahan kinerja dari organisasi baik itu privat maupun publik. Sejumlah ahli telah berupaya untuk mendefinisikan inovasi. Terminologi inovasi juga digunakan secara positif dalam dinamika perubahan organisasi ke arah yang lebih baik. Inovasi erat kaitannya dengan perubahan dalam sebuah organisasi. Perubahan dan inovasi merupakan sebuah fenomena yang tumpang tindih sehingga diperlukan ada kejelasan definisi diantara keduanya. Dalam terminologi umum, inovasi adalah satu ide kreatif dimana diimplementasikan untuk menyelesaikan tekanan dari suatu masalah (Sangkala 2013 :26).

Osborne & Brown dalam Rahayu (2013 : 81) menyatakan bahwa inovasi merupakan representasi dari ketidakberlanjutan kondisi dimasa yang lalu. Ketidakberlanjutan ini menjadi karakteristik yang membedakan inovasi dari perubahan. Lebih lanjut dikatakan inovasi adalah pengenalan terhadap elemen baru ke dalam pelayanan organisasi dalam bentuk sebuah pengetahuan baru, organisasi baru, manajemen atau keterampilan proses yang baru. Pugh menyatakan inovasi adalah sebuah pengenalan atas fitur baru dalam organisasi. Inovasi dicerminkan oleh produkproduk dan proses produksi baru, kemajuan dalam teknologi komunikasi, organisasi dan layanan baru disektor publik dan sektor non-profit.

Rahayu (2013:82), menyatakan bahwa inovasi organisasi berkaitan dengan adopsi sebuah idea atau perilaku yang sifatnya baru bagi organisasi yang mengadopsinya. Secara lebih khusus, inovasi didefinisikan sebagai

sebuah awal penggunaan ide oleh sebuah organisasi dengan tujuan yang sama. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa inovasi memiliki nilai tambah karena keterbaruan yang dibawa ke dalam organisasi. Inovasi merupakan hasil kerja dari *Knowing* dibandingkan *doing*, inovasi dapat dilakukan secara efektif dengan memperhatikan aspek utama dalam organisasi, Ducker mengungkapkan bahwa proses ini tidak hanya mengidentifikasi kesempatan yang menarik tetapi juga membutuhkan seorang individu untuk mencapai respon yang disebut sebagai *functional inspiration*. Fitur *kedua*, dari inovasi adalah hubungan terhadap penemuan consensus bahwa penemuan adalah sebuah generalisasi dari ide yang baru, *there is none as to whether this is an intrinsic part of innovation*. Urbe menilai bahwa inovasi terdiri dari *the generation of a new idea* dan di implementasikan ke dalam produk proses atau pelayanan baru. Inovasi tidak pernah merupakan sebuah fenomena satu waktu tetapi sebuah proses panjang dan kumulatif dari sebuah proses pembuatan kebijakan organisasi dari fase generalisasi ide baru ke dalam tahap implementasi. Fase *ketiga* dari inovasi adalah proses dan outcome. Sejumlah studi memfokuskan pada proses alami sebagai sebuah proses transformasi. Hal ini memungkinkan untuk membahas inovasi sebagai produk actual dari proses ini (dalam Rahayu, 2013 : 82-84).

Inovasi pelayanan kesehatan membuktikan bahwa menghasilkan perubahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih baik. Adanya inovasi pelayanan kesehatan pada suatu institusi juga membuktikan adanya kemauan keras dari dalam organisasi kesehatan untuk berbuat lebih baik, sebab



menciptakan inovasi pelayanan tidaklah mudah, organisasi yang mampu memandang diri sendiri sebagai pelayan masyarakatlah yang mampu menciptakan inovasi yang sulit untuk dirinya sendiri akan tetapi bermanfaat bagi masyarakat yang luas. Tipologi inovasi di sektor publik menurut Halvorsen adalah sebagai berikut : 1) *a new or improved service* (pelayanan baru atau pelayanan yang diperbaiki), misalnya kesehatan dirumah. 2) *Process innovation* (inovasi proses) misalnya perubahan dalam proses penyediaan pelayanan atau produk. 3) *Administrative innovation* (inovasi administratif), misalnya penggunaan instrumen kebijakan baru sebagai hasil dari perubahan kebijakan. 4) *System innovation* (inovasi sistem) adalah sistem baru atau perubahan mendasar dari sistem yang ada dengan mendirikan organisasi baru atau bentuk baru kerjasama dan interaksi. 5) *Conteptual innovation* (inovasi konseptual) adalah perubahan dalam outlook , seperti misalnya manajemen air terpadu atau mobility leasing Radical change of rationality (perubahan radikal), yang dimaksud adalah pergeseran pandangan umum atau mental matriks dari pegawai instansi pemerintah (Putra, 2017: 297-298).

Menurut Suwarno (dalam Fanid, 2016: 5) mengatakan bahwa inovasi mempunyai satu sifat mendasar yaitu sifat kebaruan. Sifat kebaruan ini merupakan ciri-ciri dasar inovasi dalam menggantikan pengetahuan, cara, objek, teknologi atau penemuan yang lama, yang sudah tidak efektif dalam menyelesaikan suatu masalah atau menjawab suatu kebutuhan tertentu. Walaupun tidak ada satu kepahaman definisi mengenai inovasi, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa inovasi mempunyai atribut:

- a. *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif) Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.
- b. *Compatibility* (*Kesesuaian*) Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.
- c. *Complexity* (*Kerumitan*) Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.
- d. *Triability* (Kemungkinan Dicoba) Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

- e. *Observability* (Kemudahan Diamati) Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

## 2. Tingkatan inovasi

Shapiro dalam Rahayu (2015 : 95) secara tegas menyatakan bahwa inovasi merupakan suatu *capability* (kapabilitas). Bagi organisasi yang inovatif, seluruh aspek dari suatu kapabilitas harus dipertimbangkan. Inovasi sebagai suatu kapabilitas dapat dilihat dalam tingkatan pengembangan inovasi dalam dimensi penambahan nilai atau *value added*, dan kondisi kecanggihan atau *sophistication*. Pada tingkatan pertama, inovasi sebagai *event*, pada tingkatan kedua sebagai *process*, dan tingkatan ketiga, inovasi sebagai *capability*. Berikut ini ilustrasinya:

Gambar 1. Tingkatan-tingkatan inovasi



(Shapiro) dalam Rahayu, 2015 : 95

Tingkat pertama, kebanyakan orang melihat inovasi hanya sebagai 'event' atau kejadian semata, memang demikian pada awalnya. Inovasi dalam tingkatan sebagai *event*, pada awalnya memang baru berupa *brainstorming* dan kontes memamerkan ide-ide baru. Jika ide-ide baru tersebut diterima oleh

organisasi maka di sana ada nilai tambah bagi organisasi. Syarat pada tahapan ini adalah perlunya prakondisi yang mendukung, dan kepemimpinan yang terbuka. Pada tingkatan yang lebih tinggi, inovasi tidak hanya sekedar ide-ide baru, namun juga menjadi bagian dari suatu proses produksi, di mana organisasi memasukkan inovasi ke dalam perencanaan, dan struktur dari pemecahan masalah, mewujudkannya, dan mengembangkannya serta mengevaluasi implementasi dari ide-ide baru tersebut.

Prakondisi pertama selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah peluang baru lengkap dengan dukungan infrastruktur dan sumberdaya yang diperlukan. Tingkatan selanjutnya inovasi akan sebagai capability manakala inovasi tidak hanya untuk memecahkan masalah semata, melainkan merepresentasikan organisasi itu sendiri dan apa yang mereka lakukan sepenuhnya sangat inovatif.

### **3. Kriteria Inovasi**

Dengan merujuk kepada sejumlah pemahaman mengenai inovasi, dapat disimpulkan bahwa sebuah program yang inovatif bisaanya akan menjadi best practices. Dalam sidang umum PBB, telah merekomendasikan bahwa *Best practices* digunakan oleh UN sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik yang didasarkan atas apa yang terjadi di lapangan,. Best practice memiliki tiga karakteristik yang dikutip dalam *Report of the Preparatory Committee for the United Nation Conference on Human Settlement* yang di presentasikan pada sidang umum PBB, yaitu:

- a. Memiliki dampak yang dapat ditunjukkan dan didemonstrasikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- b. Merupakan hasil dari kerjasama yang efektif antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat sipil;
- c. Berkelanjutan secara sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka instrument best practices inilah yang dipilih untuk digunakan dalam menilai inovasi program yang ada dan yang telah ditetapkan. Adapun kriteria best practices menurut UN (dalam Sangkala, 2014 : 8) terdiri atas :

- a. Dampak (*Impact*), sebuah best practice harus menunjukkan sebuah dampak positif dan dapat dilihat (*tangible*) dalam meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak beruntung.
- b. Kemitraan (*partnership*), sebuah best practice harus didasarkan pada sebuah kemitraan antara aktor-aktor yang terlibat, setidaknya melibatkan dua pihak.
- c. Keberlanjutan (*sustainability*), sebuah best practice harus membawa perubahan dasar dalam wilayah permasalahan berikut :
  1. Legislasi, kerangka peraturan oleh hukum atau standar formal yang menghargai isu-isu dan masalah yang dihadapi;
  2. Kebijakan sosial dan atau strategi sektoral di daerah yang memiliki potensi bagi adanya replikasi dimanapun;

3. Kerangka Institusional dan proses pembuatan kebijakan yang memiliki kejelasan peran kebijakan dan tanggung jawab beragam tingkatan dan kelompok aktor seperti pemerintah pusat dan daerah, LSM, dan organisasi masyarakat.
  4. Efisien, transparan dan sistem manajemen yang akuntabel dapat membuat lebih efektif penggunaan sumber daya manusia, teknik dan keuangan.
- d. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (*leadership dan community empowerment*) yakni :
3. Kepemimpinan yang menginspirasi bagi adanya tindakan dan perubahan termasuk di dalamnya perubahan dalam kebijakan publik;
  4. Pemberdayaan masyarakat, rukun tetangga dan komunitas
  5. lainnya serta penyatuan terhadap kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.
  6. Penerimaan dan bertanggungjawab terhadap perbedaan sosial dan budaya.
  7. Kemungkinan bagi adanya transfer (*transferability*) pengembangan lebih lanjut dan replikasi.
  8. Tepat bagi kondisi lokal dan tingkatan pembangunan yang ada.
- e. Kesetaraan Gender dan pengecualian sosial (*gender equality dan social inclusion*) yakni inisiatif haruslah dapat diterima dan merupakan

#### **4. Ciri – ciri Inovasi**

- a. Memiliki kekhasan/khusus artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan.
- b. Memiliki ciri atau unsur kebaruan, dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar orsinalitas dan kebaruan.
- c. Program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang yang tidak tergesa-gesa, namun keg-inovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu.
- d. Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan, program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

## **5. Faktor Penunjang Inovasi**

Faktor Penunjang Inovasi Menurut Everett M. Rogers (dalam Erawati : 2015) Inovasi dapat ditunjang oleh beberapa faktor pendukung seperti:

- a. Adanya keinginan untuk merubah diri, dari tidak bisa menjadi bisa dan dari tidak tahu menjadi tahu.
- b. Adanya kebebasan untuk berekspresi.
- c. Adanya pembimbing yang berwawasan luas dan kreatif.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana.

- e. Kondisi lingkungan yang harmonis, baik lingkungan keluarga, pergaulan, maupun sekolah.

## **6. Tahapan dalam Proses Inovasi**

De Jong & Den Hartog (dalam Erawati : 2015) dalam 4 tahap sebagai berikut:

- a. Melihat peluang. Peluang muncul ketika ada persoalan yang muncul atau dipersepsikan sebagai suatu kesenjangan antara yang seharusnya dan realitanya. Oleh karenanya, perilaku inovatif dimulai dari ketrampilan melihat peluang.
- b. Mengeluarkan ide. Ketika dihadapkan suatu masalah atau dipersepsikan sebagai masalah maka gaya berfikir konvergen yang digunakan yaitu mengeluarkan ide yang sebanyak-banyaknya terhadap masalah yang ada. Dalam tahap ini kreativitas sangat diperlukan.
- c. Mengkaji ide. Tidak Semua ide dapat dipakai, maka dilakukan kajian terhadap ide yang muncul. Gaya berfikir divergen atau mengerucut mulai diterapkan. Salah satu dasar pertimbangan adalah seberapa besar ide tersebut mendatangkan kerugian dan keuntungan. Ide yang realistik yang diterima, sementara ide yang kurang realistik dibuang. Kajian dilakukan terus menerus sampai ditemukan alternatif yang paling mempunyai probabilitas sukses yang paling besar.



- d. Implementasi. Dalam tahap ini, keberanian mengambil resiko sangat diperlukan. Resiko berkaitan dengan probabilitas kesuksesan dan kegagalan. Hal ini berkaitan dengan probabilitas untuk sukses yang disebabkan oleh kemampuan pengontrolan perilaku untuk mencapai tujuan atau berinovasi.

### **C. Pemerintah Daerah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang (Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945), sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut maka diundangkanlah Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan untuk daerah kabupaten dan kota didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan

kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian kewenangan otonomi Kepala Daerah yang terdiri dari daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota yaitu daerah provinsi diberikan kewenangan secara terbatas yang meliputi kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota. Melalui otonomi diharapkan daerah akan mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintahan pusat diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber- sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada masyarakat (Widjaja, 2013: 7).

Menurut Suhady dalam Riswan (2014: 197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja ( W. Riswan Tjandra 2014 : 197).

Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana : “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingannya.

Pengertian Pemerintah Daerah Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif) (Inu Kencana Syafie, 2013:21-22).

Menurut C.F. Strong sebagaimana dikutip oleh Inu Kencana Syafie (2013:22) : *Government in the broader sense, is changed with the maintenance of the peace and security of state with in and with out. It must therefore, have first military power or the control of armed forces, secondly legislative power or the means of making law, thirdly financial power of the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending of state and of enforcing the law it makes on the state behalf.*

Samuel Edward Finer dalam bukunya *Comperative Government* sebagaimana dikutip oleh Inu Kencana Syafie, menyatakan bahwa istilah *government*, paling sedikit mempunyai empat arti (2015:3-4) : (1) menunjukkan kegiatan atas proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atau pihak lain (*the activity or the process of roverning*). (2) menunjukkan masalah-masalah negara dalam mana kegiatan atau prosedi atas dijumpai (*states of affairs*). (3) menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (*people changed with the duty of governing*). (4) menunjukkan cara, metode, atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (*the manner, method or system by witch a particular society is governed*).

Pemerintahan dalam arti luas menurut Carl J. Frederich adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri. Pemerintahan semata-mata tidak hanya sekedar menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif menurut Titik Triwulan Tutik (dalam Syafie, 2015 :97). Uraian-uraian di atas dapatlah dirumuskan bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Menurut Titik Triwulan Tutik, (dalam Syafie 2015 :6).

## **D. Konsep Landasan Hukum Program Badan Usaha Lorong**

### **1. Landasan Hukum**

Program “Badan Usaha Lorong (BuLo)” merupakan turunan dan penjabaran dari visi dan misi Kota Makassar sebagaimana yang tercantum dalam: Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019.

- a. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- c. Peraturan Walikota Makassar Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan

Benang merah turunan visi dan misi Kota Makassar yang memiliki keterkaitan dengan Program " Badan Usaha Lorong (BuLo), dijabarkan sebagai berikut: Visi Kota Makassar 2025 adalah “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”. Visi Provinsi Sulawesi Selatan 2018 adalah “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”. Berdasarkan pada visi tersebut,

maka diturunkanlah Visi RPJMD Kota Makassar 2014-2019 adalah: “Makassar Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua”

## **2. Program-Program Inovasi Kota Makassar**

Visi kota Makassar dipertegas dalam perda kota Makassar nomor 5 tahun 2014 tentang RPJMD kota Makassar tahun 2014-2019 pasal 4 ayat 2 bahwa RPJMD disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi pemerintah kota Makassar. Program *Smart City* di Kota Makassar menekankan pada berbagai layanan digital (aplikasi sistem berbasis web) dalam menunjang program pemerintah kota Makassar dan mendekatkan serta meningkatkan pelayanan ke masyarakat secara *online*. Program tersebut sebagai berikut:

1. *Apartement Lorong (Aparong)*, Pemerintah Kota Makassar akan menyediakan *Apartemen Lorong (Aparong)* yang merupakan bagian dari program Pemerintah menjamin kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). *Aparong* diperuntukkan bagi pekerja MBR dan masyarakat kurang mampu punya lahan tapi tidak larangan untuk membangun. Menurutnya, inovasi tersebut adalah sebuah solusi untuk menangani masalah pemukiman kumuh di lorong-lorong dengan konsep dapat di bongkar pasang. selain itu rumah ramah lingkungan itu bagi warga kurang mampu.

2. *Home Care, Makassar Home Care* yang lebih dikenal dengan istilah *Dottoro ta`*, sebuah layanan kesehatan berbasis teknologi yang ramah pada pasien karena memungkinkan dokter mengunjungi pasien di rumah-rumah.
3. *Tangkasaki*, Mobil sampah ini nantinya akan dilengkapi dengan *CCTV* yang rencananya akan di pasang didalam bak sampah untuk mengetahui dan memonitor berapa banyak sampah yang dimuat sampai ke TPA, selain untuk mengetahui apakah mobil sampah itu menjalankan operasionalnya mengangkut sampah warga atau tidak, karena masalah sampah dan kebersihan menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Danny-Ical yaitu *Makassarta Tidak Rantasa (MTR)*.
4. *Free Wi-Fi*, Makassar Akan Dipasangi *Wi-Fi* Gratis 10 Titik di Kecamatan. Pemkot Makassar telah menggandeng PT Telkom untuk menyukseskan program ini, BUMN bidang telekomunikasi tersebut telah siap mendukung program ini. Program Makassar *Smart City* ini akan disosialisasikan ke masyarakat melalui media, sehingga masyarakat mengetahui program tersebut yang lebih banyak memanfaatkan IT lewat dunia maya.
5. *Lorong Garden (Longgar)*, Longgar ini memanfaatkan lorong yang ada menjadi lebih produktif. Dimana diupayakan lorong hijau dan bersih, dengan menanam berbagai tanaman seperti sayur, tomat, cabai, dan lain lain, Danny merencanakan akan membuat badan usaha lorong, dan hasil

tanaman ini akan dipasarkan sehingga menjadi nilai ekonomi warga khususnya ibu-ibu yang tinggal di lorong.

6. *CCTV perkotaan*, Pihak Kota Makassar terus berbenah untuk menjadikan Makassar sebagai *Smart City*. Salah satu adalah kemudahan mendapatkan informasi *Smart City* dengan mengintegrasikan CCTV seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. *Care and Rescue Center*, Pemerintah kota Makassar menyiapkan “*Carester*” (*Care and Rescue Center*). “*Carester*” kepanjangan *Care and Rescue Center* masih langka di Indonesia . Pemerintah Kota Makassar, dalam misi penyelamatan atau tanggap darurat (*rescue*) terdapat tiga peran utama yaitu pemadam kebakaran, ambulans, dan polisi.
8. *Smart Card*. Program *Smart City* dapat dirasakan warga kota Makassar lewat *Smart Card*, kartu yang mengintegrasikan layanan perbankan, informasi kesehatan, kependudukan dan perpajakan.
9. Badan usaha lorong (*BuLo*) di harapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi pendapatan masyarakat dengan menanam pohon cabai disetiap lorong-lorong yang ada di ibukota Makassar. Tanaman cabai ini yang nantinya akan menambah pendapatan bagi masyarakat.

program *Smart City* ini merupakan terobosan inovasi yang telah dilakukan oleh Dany Pomanto dan Syamsul Rizal. Dalam program *Smart City* ini terdapat banyak inovasi sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Sebelumnya Walikota Dany Pamanto terlebih dahulu telah membuat inovasi baru yang bernama *Lorong Garden (Longgar)*, Longgar ini memanfaatkan



lorong yang ada menjadi lebih produktif. Dimana diupayakan lorong hijau dan bersih, dengan menanam berbagai tanaman seperti sayur, tomat, cabai, dan lain lain,

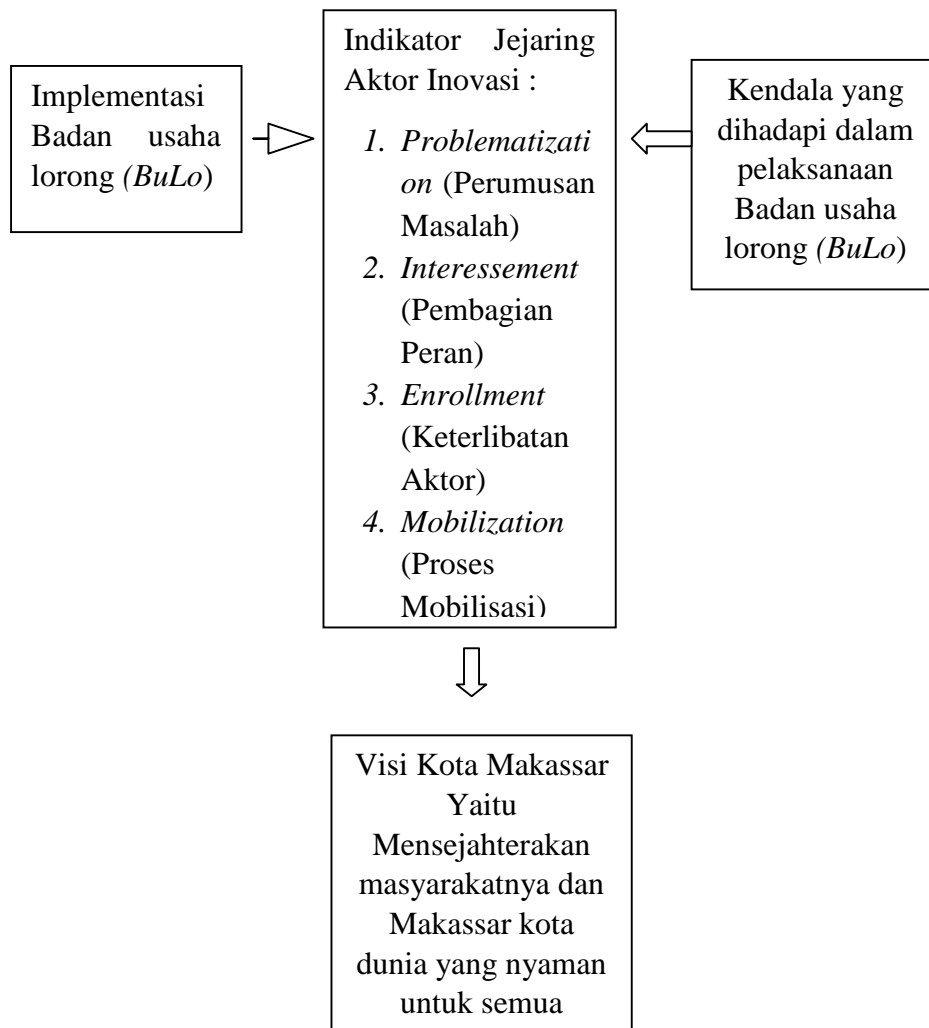
Kali ini bapak Walikota berserta SKPD-nya kembali menuangkan ide briliannya dengan kembali membuat inovasi baru yaitu BULO (Badan Usaha Lorong). Danny merencanakan akan membuat badan usaha lorong, dan hasil tanaman ini akan dipasarkan sehingga menjadi nilai ekonomi warga khususnya ibu-ibu yang tinggal di lorong (Pamanto: 2014)

#### **E. Kerangka Pikir**

Melihat permasalahan-permasalahan yang terdapat di Kota Beberapa masalah tersebut antara lain, angka kejahatan yang meningkat akibat kurangnya lowongan pekerjaan di Kota Makassar, penataan kota yang kurang tertata rapi, pemukiman yang kumuh, tidak bersih, sampah dimana-mana dan lain-lain.

Berdasarkan Visi kota Makassar yang dipertegas dalam perda kota Makassar nomor 5 tahun 2014 tentang RPJMD kota Makassar tahun 2014-2019 pasal 4 ayat 2 kali ini bapak Walikota berserta Satuan Perangkat Daerah kembali menuangkan ide briliannya dengan kembali membuat inovasi baru yaitu Badan usaha lorong (*BuLo*). Danny merencanakan akan membuat badan usaha lorong, dan hasil tanaman ini akan dipasarkan sehingga menjadi nilai ekonomi warga khususnya ibu-ibu yang tinggal di lorong. Sehingga dapat mensejahterahkan masyarakatnya dan dapat mewujudkan visi kota Makassar sebagai “Makassar kota dunia yang nyaman untuk semua.

**Gambar 2: Bagan kerangka pikir**



#### **F. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam proposal ini adalah bagaimana Jejaring Aktor Inovasi dalam Pelaksanaan Badan usaha lorong (*BuLo*) di Kelurahan Bukana Kecamatan Rappocini yang di analisis dengan menggunakan elemen *Problematization* (Perumusan Masalah), *Interessement* (Pembagian Peran),

*Enrollment* (Keterlibatan Aktor), *Mobilization* (Proses Mobilisasi), serta melihat apa saja kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Badan usaha lorong (*BuLo*) di Kelurahan Bukana Kecamatan Rappocini.

### **G. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Implementasi Badan usaha lorong (*BuLo*) merupakan program pengendalian laju inflasi ekonomi masyarakat kota makassar melalui pengembangan lorong - lorong Makassar menjadi lorong produktif melalui penanaman tanaman produktif yang bernilai ekonomis yang juga merupakan program lanjutan dari Lorong Garden di Kecamatan Rappocini.
2. Inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. secara umum dapat disimpulkan bahwa inovasi mempunyai berbagai program yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai pelaksanaan inovasi itu berhasil atau tidak.
3. Jejaring aktor Inovasi merupakan kemampuan Pemerintah Kota Makassar dalam pengembangan sains dan teknologi melalui program Badan Usaha Lorong (*BuLo*) dengan menganalisis hubungan aktor secara sistematis dengan tujuan terbentuknya pola kerja sama yang stabil dengan menggunakan empat tahap dalam konsep jejaring aktor yaitu:
  - a) *Problematization* (Perumusan Masalah) merupakan tahap dimana pemerintah kota Makassar dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pekerjaan Umum dan Dinas Komunikasi dan informasi mampu untuk mendefinisikan peran aktor yang terlibat

dalam pelaksanaan program Badan Usaha Lorong dan penyelesaian masalahnya serta adanya Standar Operasional yang jelas dalam pelaksanaannya.

- b) *Interessement* (Pembagian Peran) merupakan tahap dimana pemerintah kota Makassar dalam hal ini semua dinas yang terkait memiliki program khusus dan dapat menarik ketertarikan masyarakat bahkan swasta untuk dapat berkontribusi terhadap pelaksanaan program Badan Usaha Lorong ini serta setiap aktor dapat mengerti secara jelas akan tugas dan fungsinya.
  - c) *Enrollment* (Keterlibatan Aktor) merupakan tahap dimana seluruh elemen atau aktor yang terkait memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan program Badan Usaha Lorong dan banyaknya kuantitas masyarakat bahkan pihak swasta yang terlibat dalam pelaksanaan program ini.
  - d) *Mobilization* (Proses Mobilisasi) Kemampuan untuk mengerakkan sumberdaya, dan mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan program Badan Usaha Lorong sehingga pemerintah Kota dapat menjadi katalisator dan masyarakat dapat menjadi mandiri dalam pelaksanaan program tersebut.
4. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Badan usaha lorong (*BuLo*) merupakan hal-hal yang menjadi penghambat dalam tahap pembentukan Jejaring Aktor Inovasi yang stabil yang dianalisis dari semua aktor yang terlibat.

5. Visi Kota makassar dalam mensejahterakan masyarakatnya dan makassar kota dunia yang nyaman untuk semua merupakan bagian dari tujuan utama dalam pelaksanaan program Badan Usaha Lorong sebagai program unggulan sebagai lanjutan dari program Lorong Garden.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan lokasi penelitian**

Waktu penelitian yang dilaksanakan 2 bulan setelah seminar proposal yaitu tanggal 09 Juli-09 Agustus 2018. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar sebagai tempat pelaksanaan program inovasi Badan Usaha Lorong (BuLo) karena lokasi tersebut masyarakatnya memiliki antusiasme dalam mengembangkan usaha lorong sebagai pengamatan peneliti dilapangan sebelum penelitian dilakukan selain itu akses peneliti pada lokasi penelitian dapat ditempuh dalam waktu singkat.

#### **B. Tipe dan Jenis Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini, adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara *holistik* dan dengan cara menjelaskannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah demikian pandangan Moleong dalam Junaid (2012:32). Penggunaan metode ini diharapkan mampu menjelaskan tentang jejaring aktor inovasi dalam pelaksanaan program Badan Usaha Lorong (BuLo) di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode analisis. Menurut Sugiono (2012:13) penelitian analisis yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis seluruh data yang ada. Baik itu data hasil wawancara, catatan lapangan dan data-data lain yang sifatnya menunjang penelitian mengenai jejaring aktor inovasi dalam pelaksanaan program Badan Usaha Lorong (BuLo) di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini.

### C. Sumber Data

Data-data penelitian diperoleh dari berbagai sumber data guna menjawab permasalahan penelitian, yaitu :

1. Data Primer, diperoleh melalui observasi sangat mendalam, dan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan masyarakat, dan pihak yang berwenang untuk memberikan informasi dan keterangan mengenai pelaksanaan program Badan Usaha Lorong (BuLo) sebagai inovasi pemerintah daerah di kota Makassar.
2. Data Sekunder, diperoleh melalui telaah dokumentasi secara jeli yang bersumber pada literatur dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan serta studi-studi penelitian yang sejenis yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

#### **D. Informan Penelitian**

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013:218-219) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

Pemilihan informan didasarkan pada tujuan penelitian dan pertimbangan dapat memberikan informasi tentang Jejaring aktor inovasi dalam pelaksanaan Badan Usaha Lorong (BuLo) di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini. Adapun tabel informan dalam penelitian ini sebagai berikut :



<b>No</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Inisial</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Ket</b>
<b>1.</b>	<b>Andi Arsyad</b>	<b>AA</b>	<b>Kabid Ketersediaan&amp;Produksi</b>	<b>1 orang</b>
<b>2.</b>	<b>Andi Rosmini</b>	<b>AR</b>	<b>Sub bagian perencanaan dan pelaporan</b>	<b>1 orang</b>
<b>3.</b>	<b>Muhammad Aris</b>	<b>MA</b>	<b>Seksi penganekaragaman dan pengembangan pangan local</b>	<b>1 orang</b>
<b>4.</b>	<b>Faridah Diah</b>	<b>FD</b>	<b>Bidang ketersediaan dan produksi pangan</b>	<b>1 orang</b>
<b>5.</b>	<b>Rahmat Hidayat</b>	<b>RH</b>	<b>Lurah buakana kecamatan rappocini</b>	<b>1 orang</b>
<b>6.</b>	<b>Irma</b>	<b>IR</b>	<b>Ketua kelompok Tani Lorong RT 2 RW 1 buakana kecamatan Rappocini</b>	<b>1 orang</b>
<b>7</b>	<b>Usman Jafar</b>	<b>UJ</b>	<b>Anggota koptanrong (kelompok tani lorong) RT 5 RW 1 buakana kecamatan rappocini</b>	<b>1 orang</b>
<b>Jumlah</b>				<b>7 orang</b>

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara Mendalam dan Arsip / Dokumen.

### 1. Observasi

Observasi merupakan penelitian dengan cara mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan masalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Bukana Kecamatan Rappocini

### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban. Penulis dalam melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, pedoman wawancara (*interview guide*) agar wawancara tetap berada pada focus penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Salah satu varian dari teknik wawancara adalah wawancara mendalam (*in depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman tersebut interviwer harus memikirkan

bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara.

### 3. Arsip/Dokumen

Arsip atau Dokumen mengenai berbagai informasi dan hal yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan sumber data yang penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis gambar atau foto, film audio-visual, data statistik, tulisan ilmiah yang dapat memperkaya data yang dikumpulkan. Data- data ini didapat di masyarakat di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini

## **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, setelah mendapatkan data dibutuhkan, selanjutnya diolah menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan jalan mengabstrksikan secara cermat setiap informasi yang diperoleh. Analisa ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap interaksi atau konsep-konsep yang akan diteliti. Sehubungan penelitian ini akan menjawab permasalahan yang berkenaan dengan Jejaring aktor inovasi dalam pelaksanaan Badan Usaha Lorong (BuLo) di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini maka dengan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif segera dilakukan setelah melakukan wawancara, meghimpun data sekunder maupun literatur, dan sumber-sumber lainnya terkumpul secara lengkap.

## **G. Keabsahan Data**

Menurut Sugiyono (2016: 338), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiono (2016: 338) ada 3 macam triangulasi yaitu :

### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

### **2. Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi.

### **3. Triangulasi Waktu**

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan

dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang--ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

Kota Makassar berada pada posisi yang strategis karena posisi persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Secara goeografis wilayah kota Makassar berada pada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut.

Dengan batas wilayah :

Utara : Kabupaten Kepulauan Pangkajenne

Selatan : Kabupaten Bone

Barat : Selat Makassar

Timur : Kabupaten Maros

Kota ini merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek pembangunannya dan secara demografis dengan berbagai suku bangsa yang menetap di kota ini. Suku yang signifikan jumlahnya di kota Makassar adalah suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa.

Adapun Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Rappocini, yang terdiri dari 10 Kelurahan yaitu Balla Parang, Banta Bantaeng, Bonto Makkio, Buakana, Gunung Sari, Karunrung, Kassi-Kassi, Mappala, Rappocini, Tidung. Kelurahan Buakana merupakan lokasi penelitian ini dilakukan karena terdapat BULO (Badan Usaha Lorong) yang mudah diakses peneliti.

## **1. Visi Misi Kota Makassar.**

Visi Pemerintah Kota Makassar 2014- 2019 memiliki konsistensi dengan visi Kota Makassar 2005-2025, khususnya pada penekanan “orientasi global”, dalam RPJMD dirumuskan sebagai “kota dunia”. Penekanan “berwawasan lingkungan” dan “paling bersahabat” pada visi dalam RPJPD dirumuskan sebagai “yang nyaman untuk semua” pada visi dalam RPJMD 2014-2019. Pokok visi “kota maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasa” pada visi dalam RPJPD, pada visi dalam RPJMD 2014-2019 ditempatkan sebagai bagian dari substansi “kota dunia”.

Jika dihubungkan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2018, relevansi visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 terletak pada posisi “Makassar kota dunia yang nyaman untuk semua” yang merupakan bagian penting dari terwujudnya “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”.

Pernyataan visi Pemerintah Kota Makassar 2019 memiliki tiga pokok visi yang merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Makassar pada akhir periode 2014-2019. Penjelasan masing-masing pokok visi tersebut, adalah sebagai berikut. Kota Dunia, dimaksudkan adalah Kota Makassar yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, aksesibel dan inklusifitas yang berdaya tarik tinggi atau memukau dalam banyak hal.

Diantaranya potensi sumberdaya alam dan infrastruktur sosial ekonomi yang menjanjikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan standar dunia. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “masyarakat sejahtera

standar dunia”. Nyaman, dimaksudkan adalah terwujudnya proses pembangunan yang semakin menyempitkan kesenjangan dan melahirkan kemandirian secara stabil, dalam struktur dan pola ruang kota yang menjamin kenyamanan dan keamanan bagi berkembangnya masyarakat yang mengedepankan prinsip inklusifitas serta pola hubungan yang setara antara stakeholder dan stakeholder dalam pembangunan. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “kota nyaman kelas dunia”.

Untuk Semua, dimaksudkan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial dan kemampuan diri (termasuk kelompok disabilitas). Pokok visi ini dapat diristalkan sebagai terwujudnya “pelayanan publik standar dunia dan bebas korupsi”.

## **2. Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar**

### **1. Pernyataan Visi**

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama bahwa Visi Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

*“terwujudnya rumah tangga tahan pangan yang bergizi, beragam, seimbang, dan aman berbasis lorong ada tahun 2019”*

### **2. Pernyataan Misi**

Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar adalah sebagai berikut :



- a. Meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka pelayanan penyediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang berbasis sumber daya lokal.
  - b. Menumbuhkembangkan kelembagaan ekonomi pangan di sektor lorong-lorong melalui penguatan UKM pangan.
  - c. Melakukan pengawasan dan berkoordinasi pengendalian dan pengelolaan ketersediaan pangan dan disektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
  - d. Meningkatkan kapasitas kelompok tani lorong berserta kelompok wanita tani dan sarana prasarana pendukung.
  - e. Meningkatkan partisipasi kaum perempuan sebagai penyedia utama pangan dalam rumah tangga melalui kelompok wanita tani berbasis lorong dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan.
3. Tujuan Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, memiliki tujuan utama yaitu :
- a. Meningkatkan sumber daya kapasitas aparatur dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
  - b. Meningkatkan kemampuan mengakses pangan bagi rumah tangga di tingkat kelurahan seiring upayah menurunkan prevelensi penduduk rawan pangan

- c. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, kewaspadaan, keamanan dan ketersediaan pangan di sektor pertanian, peternakan dan perikanan
- d. Meningkatkan kapasitas kelompok tani lorong beserta kelompok wanita tani sehingga mampu mewujudkan koordinasi dalam membangun ketahanan pangan
- e. Meningkatkan kapasitas kaum perempuan sebagai penyedia utama pangan dalam rumah tangga melalui kelompok wanita tani berbasis lorong.

#### 4. Sasaran

- a. Meningkatkan pelayanan, sarana prasana, disiplin, sumber daya aparatur dan sistem capaian kinerja dan keuangan
- b. Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi keluarga
- c. Meningkatnya keamanan, kewaspadaan, dan pengendalian pangan.
- d. Meningkatnya kapasitas kelompok tani lorong beserta kelompok wanita tani.
- e. Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan.

### **3. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan**

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - 2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketersediaan dan Produksi Pangan, terdiri atas :
  1. Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya pangan;
  2. Seksi Produksi Pangan.
- d. Bidang Kerawanan, Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri atas :
  1. Seksi Kerawanan dan Distribusi Pangan;
  2. Seksi Cadangan dan Harga Pangan.
- e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, terdiri atas :
  1. Seksi Komsumsi Pangan;
  2. Seksi Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan Lokal.
- f. Bidang Keamanan Pangan, terdiri atas :
  1. Seksi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan;
  2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan**

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
- e. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang Ketahanan Pangan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan;
- b. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;
- c. Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Ketersediaan dan Produksi Pangan, Bidang Kerawanan, Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Bidang Keamanan Pangan;

- d. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
- e. Mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- f. Merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;
- g. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas;
- h. Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- i. Melaksanakan pengendalian dan perencanaan teknis operasional di bidang ketersediaan dan produksi pangan, kerawanan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
- j. Menyiapkan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan;

- k. Menyediakan dan menyalurkan pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga;
- l. Melaksanakan pengelolaan cadangan pangan kota.
- m. Menentukan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
- n. Melaksanakan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- o. Menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- p. Melaksanakan penanganan kerawanan pangan;
- q. Melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan;
- r. Melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar
- s. melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- t. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
- u. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

- v. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- x. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- y. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- z. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris Daerah, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas. Sekretariat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;

- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi, Sekretariat mempunyai uraian tugas :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat;
- b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat;
- e. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat;
- f. Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;

- g. Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyiapan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- h. Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas;
- i. Mengoordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- j. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset serta urusan kehumasan, dokumentasi dan protokoler dinas;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

- n. Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara di lingkup dinas;
- o. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- d. Menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
- e. Menghimpun bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Menghimpun, memaduserasikan dan menyiapkan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dari setiap bidang untuk dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait;

- h. Menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari setiap bidang sebagai bahan evaluasi;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan. Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - o. Perencanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan;

- p. Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan;
- q. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan;
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi, Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Keuangan;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Keuangan;
- d. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meneliti dan memverifikasi kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan dokumen pencairan anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) lingkup dinas;
- g. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
- c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;

- e. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup dinas;
- f. Meminta dan menganalisa rencana kebutuhan barang unit dari setiap bidang;
- g. Membuat daftar kebutuhan barang dan rencana tahunan barang unit;
- h. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang;
- i. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian barang di lingkup dinas;
- j. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris Daerah;
- k. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler dinas;
- l. Menghimpun bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas;
- m. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- o. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;



- q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - r. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  - s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- a. Bidang Ketersediaan dan Produksi Pangan
- 1. Bidang Ketersediaan dan Produksi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan produksi pangan.
  - 2. Bidang Ketersediaan dan Produksi Pangan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
    - a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang ketersediaan dan produksi pangan;
    - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan produksi pangan;
    - c. Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan produksi pangan;
    - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan produksi pangan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

#### **4. Profil Badan Usaha Lorong**

BULO adalah badan usaha yang terdiri dari kelompok masyarakat yang bertujuan memaksimalkan ekonomi kerakyatan melalui program-program yang terintegrasi seperti Lorong Garden (Longgar) yang kemudian hasilnya dipasarkan melalui intervensi pemerintah. Program Badan Usaha Lorong (BULO) menjadi andalan Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto dalam mengatasi inflasi sekaligus untuk menghidupkan perekonomian masyarakat di lorong-lorong Kota Makassar.

Program ini sederhana tapi mampu memberikan inovasi yang menarik minat masyarakat, di mana semua penduduk di lorong-lorong diberdayakan guna mendapatkan penghasilan tambahan. Hal pertama yang tengah digagas yakni penanaman cabai dengan pemanfaatan ruang-ruang kosong perkotaan secara apik. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) melakukan penelitian terkait cabai, mulai dari proses biji menjadi bibit, bibit menjadi cabai, cabai menjadi uang, daya tahan, harga cabai berbagai kondisi (basah-kering) hingga pemanfaatannya untuk masyarakat.

#### **B. Jejaring Aktor Inovasi Dalam Pelaksanaan Badan Usaha Lorong (BuLo) di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini**

Pendekatan yang bermanfaat untuk memetakan kekuatan para aktor yang telah berjejaring dalam ruang-ruang kekuasaan yang berbeda, dalam rangka memberi penguatan pelaksanaan program Badan Usaha Lorong (*BuLo*) di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini.

Pada teori jejaring aktor ini terdapat proses translasi yang dapat dipahami sebagai suatu proses di mana suatu aktor memobilisasi sumber daya atau suatu jejaring-aktor lain untuk membentuk suatu aliansi yang menghasilkan suatu jejaring aktor yang stabil. Proses translasi dalam mengukur Jejaring Aktor Inovasi akan melibatkan tahap *Problematization*, *Interessement*, *Enrollment*, *Mobilization*. Untuk penjelasan lebih lanjut hasil penelitian ini mengacu pada empat tahapan tersebut.

### **1. Problematization**

Pada tahap ini satu atau lebih aktor kunci merumuskan masalahnya serta mendefinisikan peran aktor lain dalam penyelesaian masalah yang ia usulkan. Penyelesaian diusulkan sedemikian hingga semua aktor yang terlibat terikat kepada suatu mekanisme kendali terpusat. Untuk memperoleh penjelasan terkait tahapan ini maka terlebih dahulu dijelaskan latar belakang masalah sehingga program Badan Usaha Lorong (*BuLo*) di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini ini dianggap perlu dilakukan. Untuk itu dilakukan wawancara dengan informan Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Dinas Ketahanan pangan Kota Makassar yang mengatakan:

“ini program yang digagas pak danny yang dituangkan dalam RPJMD Makassar, penanaman cabai dengan pemanfaatan ruang-ruang kosong perkotaan apalagi masalah kita kekurangan lahan terbuka hijau ini juga Salah satu upaya pemerintah Kota Makassar dalam menumbuhkan sektor ekonomi khusus mencanangkan program ekonomi kerakyatan salah satunya dengan menanam cabe kita berupaya penanaman dilakukan disejumlah kelurahan di Makassar”  
(hasil wawancara tanggal, 28 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada gagasan yang kuat dari aktor kunci dari program Bulo ini yaitu walikota makassar yang

mengagas program Badan Usaha Lorong (*BuLo*) dengan melakukan pemanfaatan ruang-ruang kosong perkotaan yang sekaligus merupakan program yang membantu ekonomi kerakyatan masyarakat Kota Makassar.

Setelah diketahui aktor kunci dalam perancangan program lorong ini maka selanjutnya ditelusuri pembagian aktor lain yang dilibatkan dalam program Badan Usaha Lorong (*BuLo*), untuk itu dilakukan wawancara dengan informan Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, yang mengatakan bahwa:

“yang terlibat tentunya Dinas Ketahanan Pangan karena kita memfasilitasi Rapat Koordinasinya ini program disamping itu program ini sesuai dengan visi ketahanan pangan dimana selain ketersediaan pangan, juga memperhatikan fungsi ekonomi kerakyatan dan fungsi sosial menjadi kekuatan program ini”  
(hasil wawancara tanggal, 29 Juni 2018)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, yang mengatakan bahwa:

“kita di ketahanan pangan ini membantu melakukan sosialisasi, pembentukan kelompok, dan memfasilitasi media yang dibutuhkan dalam bentuk bantuan. Sosilasi kita lakukan dengan melibatkan kelurahan RT dan RW yang meberikan usulan lorong kepada kami untuk diverifikasi”  
(hasil wawancara tanggal, 28 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa keberadaan Dinas Ketahanan Pangan merupakan aktor yang berfungsi sebagai fasilitator dalam program Badan Usaha Lorong (*BuLo*), dengan adanya keterlibatan Dinas Ketahanan Pangan maka ada intansi yang mampu memfasilitasi terselenggaranya program yang dicanangkan walikota Makassar selaku aktor kunci program.

Kepala Dinas tentu harus mampu menjabarkan misi walikota makassar yang menekan pada aspek lingkungan dan sosial ekonomi berbasis smart city.

Program Badan Usaha Lorong (*BuLo*) juga melibatkan aktor lain yang tidak kalah penting pada level pelaksanaan program yaitu Lurah disetiap wilayah yang memiliki lorong di Kota Makassar namun penelitian ini lokusnya ada pada wilayah Buakana Kecamatan Rappocini sehingga informan yang dapat dimintai keterangan adalah Lurah Buakana Kecamatan Rappocini, beliau mengemukakan bahwa:

“disini kita mengusulkan 15 koptanrong (kelompok tani lorong) kelompok ini nanti kita aka dibekali dengan pupuk dan bibit agar lorong yang ini menjadi produktif tidak Cuma bagus dari segi estetika tapi juga punya nilai ekonomi yang tinggi”  
(hasil wawancara tanggal, 10 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa jejaring aktor yang dilibatkan disini adalah Lurah Buakana Kecamatan Rappocini yang terlibat dalam pengusulan Koptanrong (kelompok tani lorong) keberadaan lurah disini untuk menyaring kelompok yang betul-betul dapat terlibat aktif mekasimalkan lorong agar dapat bernilai ekonomis dan tentunya indah dalam hal penataan.

## **2. Interessement**

Pada tahap ini semua aktor yang teridentifikasi di tahap pertama diberikan peran khusus dan identitas khusus sedemikian hingga mereka akan tertarik terhadap suatu program/kegiatan yang ditawarkan. Program atau kegiatan ini disebut dengan program *interest* karena tujuannya memang untuk menarik mereka untuk terlibat dalam jejaring.

Cara yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat dalam inovasi program ini dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Seksi Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan Lokal Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar yang mengatakan:

“ada sejumlah tahapan yang dilakukan oleh kita disini pertama tentu kita lakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat tentang potensi penanaman di lorong-lorong ada kriteria yang juga tentu kita perhatikan seperti media, lingkungannya apakah dia terhalang oleh matahari langsung, ini tentu menarik minat masyarakat karena ini langkah yang produktif awalnya Cuma lorong sekarang bisa dihiasi tanaman produktif kemudian setelah itu ada kelompok yang kita tunjuk inilah Koptanrong”  
(hasil wawancara tanggal, 29 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan yang memfasilitasi kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang manfaat dari penanaman di lorong-lorong kota. Setelah itu masyarakat yang berminat dapat menjadi anggota Koptanrong pada setiap lorong.

Selain penjelasan melalui sosialisasi hal yang menarik minat masyarakat adalah keuntungan ekonomisnya sebagaimana hasil wawancara Lurah Buakana Kecamatan Rappocini, yang mengatakan bahwa:

“Bulo ini memaksimalkan kelompok masyarakat yang ada dilorong bisa bernilai ekonomis juga karena hasil panennya, setiap pohon bisa menghasilkan 1- 1,5 kg cabai selama tiga kali panen harga cabe sekarang lebih 20 ribu/kilonya, ini bisa dinikmati sendiri hasil panennya oleh masyarakat atau di jual di pasar terong, selain itu bukan Cuma cabe saja tapi ada juga terong, bawang yang ditanam”  
(hasil wawancara tanggal, 10 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa yang membuat program ini inovatif dan menarik karena ada upaya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dengan mengoptimalkan lorong agar mampu

memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat selain dapat digunakan untuk diri sendiri hasil panen juga dapat dijual ke pasar terong. Selain itu aneka macam tanaman dapat ditanam seperti terong, dan bawang.

Dari aspek aktor yang terlibat dalam program ini mendapat apresiasi karena terdapat penilaian yang menarik dari program ini. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Ketersediaan dan Produksi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar yang mengatakan:

“BULO saat ini jadi percontohan nasional saat ini sudah 500 Kelompok Tani oleh karena itu target kita ini yang kita bina terus, yang jadi keunggulan Bulo ini saya ini kita lihat tidak begitu membutuhkan kredit karena pengembangan hanya membutuhkan semangat kegotongroyongan masyarakat. Disamping itu didukung juga DKP kota makassar melalui bantuan bibit dan pupuk”  
(hasil wawancara tanggal, 29 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat apresiasi terhadap pelaksanaan BULO ini karena telah menjadi percontohan nasional sehingga aktor yang ada pada tingkat SKPD semakin terdorong untuk meningkatkan kinerja dengan cara terus mengawal dan melakukan pembinaan kepada Kelompok Tani yang berjumlah 500 Kelompok.

Selanjutnya pada level masyarakat atau kelompok tani mendapat respon yang positif, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan informan Lurah Buakana Kecamatan Rappocini, yang mengatakan bahwa:

“program BULO ini mendapat respon yang positif dari masyarakat karena mereka pada dasarnya ingin melihat lingkungan asri indah nah dengan adanya program ini bukan Cuma keindahan tata lorong saja yang bagus tapi juga bermanfaat dari tanamannya itu, apalagi masyarakat tinggal menanam saja karena sudah difasilitasi pemerintah masalah

bibitnya jadi pembinaan itu pada Koptanrong, Kelompok Waniya Tani itu jadi semangatnya kegotongroyangan tadi”  
(hasil wawancara tanggal, 28 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ketertarikan pada level masyarakat karena ada pendekatan kebersamaan atau kegotonroyongan sehingga pelaksanaan program ini mendapat antusiasme dari masyarakat terlebih lagi adanya bantuan dari pemerintah kota khusus Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar yang memberikan bantuan berupa wadah, bibit, dan pupuk sehingga masyarakat tinggal melaksanakan kegiatan tanpa ada beban biaya yang diberikan.

### **3. Enrollment.**

Keberhasilan suatu program/kegiatan untuk menarik para aktor untuk terlibat dalam suatu penyelesaian masalah ini akan menghasilkan komitmen para aktor menjadi bagian dari jejaring aliansi tersebut. Jika banyak aktor akhirnya menggabungkan diri ke dalam jejaring ini maka dikatakan bahwa proses enrolment telah berhasil.

Komitmen masing-masing aktor dalam penyelenggaraan program ini terus berlanjut, hal ini dapat dipahami dari kutipan wawancara dengan informan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar yang mengatakan:

“ada Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Makassar jadi disitu dilibatkan SKPD salah satunya Dinas Ketahanan Pangan dengan koperasi dan UKM, namun saat ini tanggung jawab untuk BULO ini difokuskan pada Dinas Ketahanan Pangan baik berupa sosialisasi, pembentukan kelompok, sampai pada pembinaannya”  
(hasil wawancara tanggal, 9 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa program BULO terfokus pada kinerja Dinas Ketahanan Pangan karena komitmen utama



pelaksanaan program ini tidak hanya sampai tahap sosialisasi saja tetapi sampai tahap pembentukan kelompok dan pembinaan.

Keterlibatan Kelurahan sangat penting dalam pembentukan Koptanrong (kelompok tani lorong) hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan informan Lurah Buakana Kecamatan Rappocini, yang mengatakan bahwa:

“Bulo tahap 1 500 kelompok tani lorong dipilih dari usulan kelurahan karena jumlah banyak maka kita melakukan verifikasi kelompok yang pertama indikator administrasi apakah kelompok itu sudah punya SK harus 20 orang KTPnya”  
(hasil wawancara tanggal, 10 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat diketahui bahwa perlu ada komitmen yang kuat dari tingkat kelurahan untuk membentuk Koptanrong (kelompok tani lorong) dengan melakukan verifikasi anggota yang memiliki SK dan KTP setempat sebagai persyaratan administrasi untuk bergabung dalam kelompok tani.

Selain lurah unsur lain yang mesti memiliki komitmen dalam pelaksanaan program BULO ini adalah RT/RW, hal ini disampaikan Anggota Koptanrong Kelompok Tani Lorong RT 5 RW 1 Buakana Kecamatan Rappocini, yang mengatakan bahwa :

“RT dan RW disini sebagai motor penggerak program ini. Mesti begitu, kami yang ada disini bersama warga lainnya dan yang ada di kelurahan terus mensupport agar program pemberdayaan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan sekarang sudah bisa dilihat beda itu lorong dulu dengan sekarang”  
(hasil wawancara tanggal, 12 Juli 2018)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Ketua Koptanrong Kelompok Tani Lorong RT 2 RW 1 Buakana Kecamatan Rappocini, yang mengatakan bahwa :

“ya tentu pak RT sama juga RW tau pasti warga yang ada disekitar lorong dengan semangat gotong royong maka kita kerja sama percantik itu lorong ini awal juga longgar dulu sekarang tidak Cuma itu kita tanami juga cabai lumayan juga hasil panennya ini berkat Bulo”  
(hasil wawancara tanggal, 12 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa komponen atau aktor yang juga memiliki peran dalam pelaksanaan program BULO ini adalah RT dan RW yang merupakan motor penggerak pembentukan Koptanrong (kelompok tani lorong) melalui fungsi RT dan RW yang dapat mengidentifikasi warga sekitar yang dapat berperan aktif dalam usaha lorong ini maka dapat dikatakan komitmen program BULO ini juga harus kuat pada aktor RT dan RW yang ada di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini.

#### **4. Mobilization**

Tahap ini pemerintah memiliki kemampuan untuk mengerakkan sumberdaya dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan program Badan Usaha Lorong sehingga pemerintah dapat menjadi katalisator dan masyarakat dapat menjadi mandiri dalam pelaksanaan program tersebut.

Untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah dalam menggerakkan sumber daya yang ada terkait optimalisasi program Badan Usaha Lorong (*BuLo*) ini maka dilakukan wawancara dengan informan Lurah Buakana Kecamatan Rappocini, yang mengatakan bahwa :

“ya, saya rasa semua komponen mesti bergerak, meskipun kita bisa lihat ada tahapan dalam setiap program pemerintah termsuk bulo ini. Setelah terbentuk kelompoknya seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian kita prioritaskan infrastruktur lorong, jika sudah bersih, tertata dengan baik juga, lalu kemudian kita upaya selanjutnya dibuatkan green house untuk penyemaian bibit cabai  
(hasil wawancara tanggal, 10 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa adanya dorongan dari pemerintah untuk menggerakkan semua komponen masyarakat mulai dari tahapan pembentukan kelompok sampai pada tahap pembinaan, dorongan yang kuat ini mampu membentuk upaya menyukseskan program yang bersifat partisipatif dengan melibatkan komponen masyarakat seperti Lurah, RT, RW. Hal ini merupakan upaya aktor utama dalam mewujudkan misi menggerakkan upaya partisipasi masyarakat melalui pengelolaan lorong. Situasi ini dapat digambarkan melalui kutipan wawancara dengan informan Kelompok Tani Lorong RT 2 RW 1 Buakana Kecamatan Rappocini, yang mengatakan bahwa :

“tentu program ini kita dukung, apalagi kita dapat pembinaan sudah bisa kelihatan sekarang ini lorong ini jadi tampak indah berkat dukungan semua pihak pasti lurah RT RW juga punya andil besar pasti untuk menjalankan program bulo ini”  
(hasil wawancara tanggal, 11 Juli 2018)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Anggota Koptanrong Kelompok Tani Lorong RT 5 RW 1 Buakana Kecamatan Rappocini, yang mengatakan bahwa :

“ini kita didata dulu sebelum Koptanrong ini resmi dibentuk nanti kita mendapat pembinaan kalau ditanya tentang mobilisasi ini kegiatan saya rasa ujung tombaknya ada di tingkat kelurahan ya RT dan RW kalau tidak susah pemerintah bisa gerakkan ini koptanrong”  
(hasil wawancara tanggal, 11 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa upaya menggerakkan komponen masyarakat sehingga terwujud partisipasi masyarakat terjadi karena adanya aktor-aktor pada level kelurahan yang mendorong terbentuknya Koptanrong (Kelompok Tani Lorong) sehingga pelaksanaan program ini akan yang paling kuat adalah partisipasi masyarakat tanpa upaya

lurah, RT/RW selaku tokoh pada lingkungan masyarakat di Kelurahan sulit untuk mewujudkan program BULO terlaksana dengan baik hingga pembinaan dilakukan sampai hasil panen dapat dinikmati kelompok tani lorong ini.

Upaya mobilisasi dari Lurah, RT dan RW patut ditindaklanjuti dengan pembinaan yang berkesinambungan, untuk menelusuri upaya tersebut maka dilakukan wawancara dengan informan Seksi Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan Lokal Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar yang mengatakan:

“yah yang kita pikirkan setelah kelompok itu terbentuk tentu sekarang ini adalah melakukan pembinaan bagi Koptanrong seperti penyemaian, pembibitan, pemeliharaan, sampai panen inilah aspek pemberdayaannya kita disini selain memberikan bantuan juga ada pembinaan tanpa dilakukan pembinaan secara berkesinambungan saya rasa program Bulo ini tidak akan maksimal kedepannya”

(hasil wawancara tanggal, 29 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa mobilisasi yang dilakukan oleh aktor tingkat kelurahan merupakan upaya yang sangat penting dalam program Badan Usaha Lorong (*BuLo*) karena telah ada kekuatan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program ini namun untuk kesinambungan program BULO kemampuan aktor pada level SKPD dalam mendorong kemajuan program dengan upaya pembinaan meliputi penyemaian, pembibitan, pemeliharaan, sampai panen menjadi penentu keberhasilan program Bulo pada dua tahap yaitu tahap satu dilakukan sosialisasi dan pembentukan kelompok dan tahap dua adalah pembinaan.

Secara keseluruhan tahapan Jejaring Aktor Inovasi telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat pada tahap *problematization* menunjukkan ada gagasan

yang kuat dari aktor kunci dari program Bulo ini yaitu walikota makassar yang mengagas program Badan Usaha Lorong (*BuLo*) dengan melakukan pemanfaatan ruang-ruang kosong perkotaan yang sekaligus merupakan program yang membantu ekonomi kerakyatan masyarakat Kota Makassar. Keberadaan Dinas Ketahanan Pangan merupakan aktor yang berfungsi sebagai fasilitator dalam program Badan Usaha Lorong (*BuLo*), dengan adanya keterlibatan Dinas Ketahanan Pangan maka ada instansi yang mampu memfasilitasi terselenggaranya program yang dicanangkan walikota Makassar selaku aktor kunci program.

Jejaring aktor yang penting ditahap ini adalah Lurah Buakana Kecamatan Rappocini yang terlibat dalam pengusulan Koptanrong (kelompok tani lorong) keberadaan lurah disini untuk menyaring kelompok yang betul-betul dapat terlibat aktif mekasimalkan lorong agar dapat bernilai ekonomis dan tentunya indah dalam hal penataan.

Pada tahap *interesement* ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan yang memfasilitasi kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang manfaat dari penanaman di lorong-lorong kota. Setelah itu masyarakat yang berminat dapat menjadi anggota Koptanrong pada setiap lorong yang membuat program ini inovatif dan menarik karena ada upaya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dengan mengoptimalkan lorong agar mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat selain dapat digunakan untuk diri sendiri hasil panen juga dapat dijual ke pasar terong. Selain itu aneka macam tanaman dapat ditanam seperti terong, dan bawang.

Ketertarikan pada level masyarakat karena ada pendekatan kebersamaan atau kegotonroyongan sehingga pelaksanaan program ini mendapat antusiasme dari masyarakat terlebih lagi adanya bantuan dari pemerintah kota khusus Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar yang memberikan bantuan berupa wadah, bibit, dan pupuk sehingga masyarakat tinggal melaksanakan kegiatan tanpa ada beban biaya yang diberikan.

Pada tahap *Enrollment* menunjukkan bahwa program BULO terfokus pada kinerja Dinas Ketahanan Pangan karena komitmen utama pelaksanaan program ini tidak hanya sampai tahap sosialisasi saja tetapi sampai tahap pembentukan kelompok dan pembinaan. Perlu ada komitmen yang kuat dari tingkat kelurahan untuk membentuk Koptanrong (kelompok tani lorong) dengan melakukan verifikasi anggota yang memiliki SK dan KTP setempat sebagai persyaratan administrasi untuk bergabung dalam kelompok tani.

Komponen atau aktor yang juga memiliki peran dalam pelaksanaan program BULO ini adalah RT dan RW yang merupakan motor penggerak pembentukan Koptanrong (kelompok tani lorong) melalui fungsi RT dan RW yang dapat mengidentifikasi warga sekitar yang dapat berperan aktif dalam usaha lorong ini maka dapat dikatakan komitmen program BULO ini juga harus kuat pada aktor RT dan RW yang ada di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini.

Pada tahap *Mobilization* menunjukkan bahwa adanya dorongan dari pemerintah untuk mengarahkan semua komponen masyarakat mulai dari tahapan pembentukan kelompok sampai pada tahap pembinaan, dorongan yang kuat ini mampu membentuk upaya menyukseskan program yang bersifat partisipatif

dengan melibatkan komponen masyarakat seperti Lurah, RT, RW. Hal ini merupakan upaya aktor utama dalam mewujudkan misi mengerakkan upaya partisipasi masyarakat melalui pengelolaan lorong.

Upaya mengerakkan komponen masyarakat sehingga terwujud partisipasi masyarakat terjadi karena adanya aktor-aktor pada level kelurahan yang mendorong terbentuknya Koptanrong (Kelompok Tani Lorong) sehingga pelaksanaan program ini yang paling kuat adalah partisipasi masyarakat tanpa upaya lurah, RT/RW selaku tokoh pada lingkungan masyarakat di Kelurahan sulit untuk mewujudkan program BULO terlaksana dengan baik. mobilisasi yang dilakukan oleh aktor tingkat kelurahan merupakan upaya yang sangat penting dalam program Badan Usaha Lorong (*BuLo*) karena telah ada kekuatan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program ini namun untuk kesinambungan program BULO kemampuan aktor pada level SKPD dalam mendorong kemajuan program dengan upaya pembinaan meliputi penyemaian, pembibitan, pemeliharaan, sampai panen menjadi penentu keberhasilan program Bulo.

### **C. Kendala jejaring aktor inovasi dalam pelaksanaan Badan Usaha Lorong (*BuLo*) di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini**

Kendala yang dihadapi jejaring aktor inovasi dalam pelaksanaan Badan usaha lorong (*BuLo*) merupakan hal-hal yang menjadi penghambat dalam tahap pembentukan Jejaring Aktor Inovasi yang dianalisis dari aktivitas aktor yang terlibat. Pada level pimpinan upaya transformasi program ini belum berjalan sepenuhnya hal ini disampaikan kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar yang mengatakan:

“Sebagaimana yang diungkapkan Walikota dalam rapat koordinasi ada lima tahapan yang dicanangkan BULO, itu mencakup rancangan program, persiapan calon penerima dan calon lokasi, implementasi tanam cabe, replikasi program, dan pengembangan BULO. Saat ini pelaksanaan program BULO ini masih sampai pada implementasi tanam cabe”  
(hasil wawancara tanggal, 29 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa saat ini terdapat tahapan program BULO yang dicanangkan Walikota Makassar sebagai aktor inovasi program na ada lima tahapan yang dicanangkan BULO itu mencakup rancangan program, persiapan calon penerima dan calon lokasi, sampai implementasi tanam cabe.

Sejauh ini pelaksanaan program BULO terdapat sejumlah kendala yang ditemui termasuk pada karakteristik lahan, hal ini disampaikan oleh informan Bidang Ketersediaan dan Produksi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar yang mengatakan:

“Lokasi Syarat teknis kelayakan lorong itu penyinaran mataharinya memungkinkan liat juga faktor lingkungan karena budidaya cabe butuh perlakuan tertentu tidak semua lorong dapat menjadi bagian program BULO ini kita batasi saat ini 500 lorong karena itulah yang layak masuk dalam syarat teknis lokasi BULO.  
(hasil wawancara tanggal, 29 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tidak semua lorong dapat dijadikan sebagai objek pelaksanaan program Badan usaha lorong (*BuLo*) ini didasarkan adanya persyaratan teknis yang menjadi kendala karena lokasi harus mendapat penyinaran matahari yang cukup karena budidaya cabe membutuhkan penyinaran matahari sehingga lorong yang full terhalang bangunan permanen tidak dapat dijadikan objek lokasi BULO sehingga saat ini yang didata



lokasi BULO adalah 500 Lorong yang telah diverifikasi berdasarkan lokasi dan Kelompok Tani.

Kendala selanjutnya yang ditemui pada level SKPD khususnya pada pengimplementasian pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan yaitu kurangnya optimalnya pemanfaatan sarana yang diberikan, hal ini dapat ditelusuri dari hasil wawancara dengan informan Seksi Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan Lokal Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar yang mengatakan:

“Bantuan yang kita berikan seperti media taman, rak tanaman masing-masing 15 rak satu kelompok, bibit, kepada pokdanrong ini saya lihat masih ada yang kurang maksimal pemanfaatannya biasanya ada pada rak yang tidak terisi penuh tidak ditanami semua ini terjadi karena bibit cabe sudah ditanami semua semestinya masih bisa digunakan untuk tanaman lain”

(hasil wawancara tanggal, 29 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada rak tanam yang tidak dimaksimalkan karena penggunaan bibit cabe yang telah ditanam semua. Oleh karena itu diperlukan pula kreatifitas dari masyarakat untuk memanfaatkan rak kosong yang belum ditanami dengan tanaman lain.

Selain itu pada tingkatan pelaksana kegiatan Koptanrong (Kelompok Tani Lorong) terdapat kendala yang ditemui yaitu terbatas partisipasi pemuda dalam kegiatan BULO hal ini diungkapkan oleh informan Anggota Koptanrong Kelompok Tani Lorong RT 5 RW 1 Buakana Kecamatan Rappocini, yang mengatakan bahwa:

“kalau yang terlibat disini kita ini dek, RT pak RW kita ini yang aktif dalam BULO ini paling orang tua. Anak muda kurang karena mungkin kurang menarik lebih banyak kerja dan jalannya jadi agak sulit kalau

anak muda mau terlibat, bisa diliat yang ikut pembinaan itu orang tua ibu rumah tangga”  
(hasil wawancara tanggal, 29 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa partisipasi pemuda masih minim lebih banyak didominasi ibu rumah tangga. Selain kendala partisipasi pemuda, kendala lain pelaksanaan BULO ini adalah pemasaran hasil panen, Hal ini disampaikan Ketua Kelompok Tani Lorong RT 2 RW 1 Buakana Kecamatan Rappocini, yang mengatakan bahwa :

“untuk pemasaran sendiri belum kita lakukan hanya untuk kebutuhan sendiri kebanyakan kita pakai untuk warga sekitar, mengingat ini juga baru kita tambahkan lagi bibitnya jadi sekarang belum kita lakukan, tunggu dulu hasilnya banyak baru bicara pemasaran”  
(hasil wawancara tanggal, 29 Juni 2018)

Hal ini juga diakui oleh Lurah Buakana Kecamatan Rappocini, yang mengatakan bahwa :

“saat ini hasil panen yang kita pasarkan belum optimal kebanyakan Koptanrong juga terkendala kalau masuk musim kemarau tidak semua panen dapat bagus biasa juga ada kendala perairan jadi untuk pemasaran sendiri kita lebih banyak disini lebih banyak dimanfaatkan warga”  
(hasil wawancara tanggal, 29 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Koptanrong (Kelompok Tani Lorong) tidak dapat memaksimalkan hasil panen sampai pada tahap pemasaran karena hasil yang diperoleh belum maksimal ini dikarenakan kendala musim kemarau dan air yang disediakan serta pembinaan yang masih terus dilakukan masih membutuhkan waktu untuk memaksimal hasil panen kelompok tani lorong.

Berdasarkan serangkaian penjelasan di atas dapat diuraikan sejumlah kendala yang dihadapi jejaring aktor inovasi dalam pelaksanaan Badan usaha

lorong (*BuLo*) yaitu tidak semua lorong dapat dijadikan sebagai objek pelaksanaan program Badan usaha lorong (*BuLo*) ini didasarkan adanya persyaratan teknis yang menjadi kendala karena lokasi harus mendapat penyinaran matahari yang cukup, kendala lainnya yang ditemui pada level SKPD khususnya pada pengimplementasian pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan yaitu tidak dioptimalkannya pemanfaatan sarana yang diberikan.

Kendala selanjutnya adalah partisipasi pemuda masih minim lebih banyak didominasi ibu rumah tangga. Selain kendala partisipasi pemuda, dan kendala terakhir adalah Koptanrong (Kelompok Tani Lorong) tidak dapat memaksimalkan hasil panen sampai pada tahap pemasaran karena hasil yang diperoleh belum maksimal ini dikarenakan kendala musim kemarau dan air yang disediakan serta pembinaan yang masih terus dilakukan masih membutuhkan waktu masih membutuhkan waktu agar program ini berjalan optimal.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Jejaring Aktor Inovasi dalam pelaksanaan Program Badan Usaha Lorong (BuLo) di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan tahapan Jejaring Aktor Inovasi berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat pada tahap *problematization* menunjukkan ada gagasan yang kuat dari aktor kunci dari program Bulo ini yaitu walikota makassar yang mengagas inovasi program *BULO* dengan Jejaring aktor merambat pada Dinas Ketahanan Pangan berfungsi sebagai fasilitator dalam program BULO, selain itu jejaring aktor Lurah Buakana Kecamatan Rappocini yang terlibat dalam pengusulan Koptanrong (kelompok tani lorong) berfungsi menyaring kelompok yang betul-betul dapat terlibat aktif.
2. Hasil penelitian pada tahap *interesement* menunjukkan bahwa program ini inovatif dan menarik karena ada upaya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dengan mengoptimalkan lorong selain itu pendekatan kebersamaan atau kegotonroyongan merupakan hal yang positif untuk program ini.
3. Hasil penelitian pada tahap *Enrollment* menunjukkan bahwa program BULO terfokus pada kinerja Dinas Ketahanan Pangan karena komitmen utama pelaksanaan program ini tidak hanya sampai tahap sosialisasi saja tetapi sampai tahap pembentukan kelompok dan pembinaan. Komponen atau aktor yang juga

memiliki peran dalam pelaksanaan program ini adalah RT dan RW yang merupakan motor penggerak pembentukan Koptanrong melalui fungsi RT dan RW yang dapat mengidentifikasi warga sekitar yang dapat berperan aktif.

4. Hasil penelitian pada tahap *Mobilization* menunjukkan bahwa mobilisasi yang dilakukan oleh aktor tingkat kelurahan merupakan upaya yang sangat penting dalam program BULO karena telah ada kekuatan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program ini namun untuk kesinambungan program BULO kemampuan aktor pada level SKPD dalam mendorong kemajuan program dengan upaya pembinaan meliputi penyemaian, pembibitan, pemeliharaan, sampai panen menjadi penentu keberhasilan program BULO.
5. Kendala yang dihadapi jejaring aktor inovasi dalam pelaksanaan BULO yaitu tidak semua lorong dapat dijadikan objek pelaksanaan program, kendala lainnya yaitu tidak dioptimalkannya pemanfaatan sarana yang diberikan, partisipasi pemuda masih minim lebih banyak didominasi ibu rumah tangga. Koptanrong tidak dapat memaksimalkan hasil panen sampai pada tahap pemasaran karena hasil yang diperoleh terkendala kendala musim kemarau dan air.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya konektivitas program antara BULO (Badan Usaha Lorong) dan LONGGAR (Lorong Garden) karena kedua program ini memiliki objek yang sama yaitu Lorong kedua program ini dapat dilakukan secara bersamaan.

2. Agar program ini menarik minat pemuda maka perlu juga diinisiasi dengan membuat poster atau gambar yang menarik minat pemuda lewat sosial media, facebook atau instagram.
3. Pembinaan yang dilakukan harus berkesinambungan masti dikontrol tiap bulan oleh Dinas Ketahanan Pangan agar dapat diketahui pelaksanaan pembinaan dari program BULO ini berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djamrut, Dayang Erawati. 2015. *Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*. Diakses dari eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3 Nomor 3, 2015, ISSN: 1472–1486.
- Huda, Uhsina & Marita Ahdiyana. 2016. Jejaring Kebijakan dalam Pelaksanaan Pengembangan Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul. Diakses tanggal 24 Januari 2018 dari Jurnal Student UNY, Vol.5 No.11. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/view/5274/4984>
- Innah, Henry Silka dkk. 2012. Peran Dinamika Jejaring-Aktor dalam Reforestasi di Papua (The Role of Actor-Network Dynamics on Reforestation in Papua). Diakses tanggal 24 Januari pada Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Juni, Vol. 9 No. 2. [http://forda-mof.org/files/Jurnal\\_Sosek\\_9-2-2012-5.Henry\\_Silka,\\_dkk.pdf](http://forda-mof.org/files/Jurnal_Sosek_9-2-2012-5.Henry_Silka,_dkk.pdf)  
Diakses tanggal 24 Januari pada Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Juni, Vol. 9 No. 2. [http://forda-mof.org/files/Jurnal\\_Sosek\\_9-2-2012-5.Henry\\_Silka,\\_dkk.pdf](http://forda-mof.org/files/Jurnal_Sosek_9-2-2012-5.Henry_Silka,_dkk.pdf)
- Peraturan Daerah No.5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Makassar.
- Pomanto, Moh. Ramdhan. 2014. *8 Jalan Masa depan, Mainstream Baru Pembangunan Makassar*. Makassar: Pelita Pustaka.
- Pratama, Mohamad Yanuar. 2016. Inovasi Pelayanan Publik Melalui Smart Card Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. Diakses tanggal 25 Januari 2018 pada jurnal Publika Vol.4 No.11. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/18536>
- Priyatma, Johannes Eka. 2013 *Potensi Teori Jejaring Aktor Untuk Memahami Inovasi Teknologi*. *Teknik Informatika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*, e Journal Ilmu Pemerintahan Vol. 1 109-111. <http://repository.usd.ac.id/id/eprint/4456>
- Putra, Arjuna dkk. 2017. Inovasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Berbasis Home Care Di Kota Makassar. Diakses tanggal 25 Januari 2018 dari jurnal Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3 No. 3. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/1053/967>
- Rahayu, Ami. 2013. Manajemen perubahan dan inovasi. Jakarta : Lembaga penerbit Universitas Indonesia (UI-Pers).
- Riswan, Tjandra W. 2014. *Hukum Keuangan Negara* Jakarta: Grasindo.

- Sangkala. 2013. *Innovative Government*. Yogyakarta: Capiya Publishing.
- Sartika, Dewi. 2017. Analisis Pengelolaan Gemar Lorong Garden (longgar) di Kota Makassar. Makassar: Universitas Hasanuddin. Diakses tanggal 24 Januari 2018. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/25410>
- Sindo News. Com. 2017. Bulo Jadi Program Andalan Angkat Perekonomian Makassar. Diakses tanggal 24 Januari 2018. <https://daerah.sindonews.com/read/1179916/192/bulo-jadi-program-andalan-angkat-perekonomian-makassar-1487073591>
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet.
- \_\_\_\_\_. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta.
- Susanti dkk. 2014. Kajian Actor Network Theory Pemilihan Bupati di Kabupaten Demak. Universitas Terbuka: Laporan Penelitian Fundamental.
- Tabak, Edin. 2015. *Information Cosmopolitics An Actor-Network Theory Approach to Information Practices*. Chandos is an imprint of Elsevier 225 Wyman Street, Waltham, MA 02451, USA Langford Lane, Kidlington, OX5 1GB, UK ISBN: 978-0-08-100121-9
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Widjaja. 2013. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad. 2017. Kontribusi Modal Sosial dalam Pengembangan Komunitas 'Urban Farming' di Lorong Garden Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Makassar: Universitas Hasanuddin Diakses tanggal 24 Januari 2018. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/24178>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dengan skripsi yang berjudul **Jejaring Aktor Inovasi Dalam Pelaksanaan Badan Usaha Lorong (BULO) Di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar**, Nama Lengkap Idha Ayu Kusumawardhani putri pertama dari 4 bersaudara anak dari Pasangan Jayadi Junaidi dan Rustini Rasjid Lahir di Ujung Pandang 11 Mei 1994.

Penulis mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar Inpres Sambung Jawa 1 Makassar tamat pada tahun 2006 di tahun itu pula penulis melanjutkan pendidikan di SMP Khadijah Makassar dan tamat pada tahun 2009 . Dan pada tahun yang sama pula saya melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 02 Makassar dan tamat pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar di Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.